LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005

DITERBITKAN : DESEMBER 2005

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
Jl.. Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang
Telp. (0711) 351028 Fax. (0711) 351028

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, namun pembangunan tidak akan berkelanjutan bila dilakukan tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan tersebut. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam melakukan klasifikasi Basis Data Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005, kami berpedoman kepada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Basis Data Lingkungan Hidup Daerah merupakan data dasar bagi keperluan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan data tersebut digunakan untuk melakukan analisis lingkungan hidup dengan ***Metode Pressure-State-Response (P-S-R)*** yang disajikan dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik moral maupun materil dalam Penyusunan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini. Selanjutnya kami menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan sebagai dokumen untuk ditindaklanjuti, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini.

Palembang, Desember 2005

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. AMIR MASSANI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 440015531

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun dan menerbitkan buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 ini disusun dengan mengacu kepada Panduan dari Pusat Informasi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup yang juga mengacu pada hasil Konferensi UNEP yang telah disepakati Negara-negara dikawasan Asia Fasifik termasuk Indonesia dan mengacu pada Metode "Pressure (Tekanan)-State (Kondisi)-Response (Reaksi)", walaupun masih ada kendala teknis/administrasi yang belum sempurna.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan efektif, merupakan salah satu upaya untuk menerapkan "Good Environmental Governance (GEG)", terutama berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen ini terdiri dari dua buku yaitu :

Buku I (Basis Data Lingkungan Hidup Daerah) menampilkan data yang berkaitan erat dengan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Buku II (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah), menampilkan data isu-isu lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, peran serta masyarakat terhadap pembangunan, evaluasi maupun analisis kebijakan dan rekomendasi untuk pengendalian dampak lingkungan hidup baik bersifat preventif maupun kuratif.

Laporan ini terwujud atas hasil kerja sama yang baik antara Tim Penyusun dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan unsur lapisan masyarakat, sehingga tersusunnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini dimaksudkan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan analisa seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Didalam laporan SLHD ini akan diperoleh data dan informasi tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia serta upaya-upaya dalam menangani permasalahan atau isu-isu lingkungan hidup yang terjadi pada Tahun 2005 guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan. Diharapkan dari laporan SLHD ini akan diketahui kondisi lingkungan yang ada dan bagaimana pemanfaatan potensi yang tersedia sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang mendukung program-program pembangunan Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga bantuan dan konstribusi data yang bersumber dari instansi teknis/pihak terkait sangat diharapkan demi meningkatkan mutu penyusunan laporan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya memberi masukan dan konstribusi data untuk penyusunan buku ini. Semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Desember 2005

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. AMIR MASSANI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 440015531

ABSTRAK

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1-4 derajat lintang selatan dan 102-108 derajat bujur timur dengan luas daerah 97.159,32 Km2, dan pada tahun 2004 penduduk sejumlah 6.628.416 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, dan secara ekologis geografis berada dalam pengaruh DAS Musi karena dilintasi oleh Sungai Ogan, Lematang, Enim, Rupit, Komering, Rawas, batang Hari Leko yang kesemuanya bermuara ke Sungai Musi. Transportasi antara Kabupaten/Kota kebanyakan dilakukan dengan kendaraan umum bus dan sebagian dengan kereta api. Sedangkan transportasi melalui sungai hanya Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir, sedangkan Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Ogan Komering Ulu dan Muara Enim disamping melalui sungai juga dilewati jalur kereta api.

Provinsi Sumatera Selatan berbatas sebelah utara dengan Provinsi Jambi, di sebelah selatan dengan Provinsi Lampung, di sebelah timur dengan Selat Karimata dan Laut Jawa, disebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu. Posisi yang demikian menempatkan Sumatera Selatan sebagai kawasan pembangunan dan investasi usaha yang pesat, serta dengan konsekuensi dan pencemaran lingkungan yang serius pula.

Pantai Timur Sumatera Selatan tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palma dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih kedalam lagi tanahnya semakin tinggi disertai oleh bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 –1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan merupakan tulang punggung, mempunyai puncak-puncaknya seperti gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung

Bungkuk (2.125 m). Disebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng yang menurun dan bagian lebih curam di sebelah timur. Pada lembah daerah Bukit Barisan terdapat daerah-daerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian terutama kopi dan sayur-sayuran.

Kebijakan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup memberi titik berat kepada dua tujuan, yaitu pertama upaya mengendalikan kegiatan pembangunan agar kelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin. Kedua mempertahankan keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif berkelanjutan.

Selanjutnya bahwa sepanjang tahun 2005 terdapat 3 (tiga) isu lingkungan hidup yang berkembang dan menonjol dalam masyarakat Sumatera Selatan. Masing-masing adalah banjir yang diikuti oleh tuntutan massa rakyat tentang terjadinya degradasi kualitas ekosistem pada Sub Daerah Aliran Sungai Musi dan pencemaran, kebakaran hutan dan lahan; dan kerusakan hutan akibat penebangan liar; sehigga hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang semula seluas 5.011.700 hektar, sekarang luasnya tinggal 3.185.079 hektar.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang dicapai pada tahun 2005 sebesar 4,38 % perhitungan dengan migas; tumbuh cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 4,11 % atau naik sebesar 0.27 %. Dilihat dari aspek lingkungan hidup, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan eksploitasi sumberdaya alam pertambangan, penggalian begitu tinggi yang diprediksi akan memberi dampak besar kepada lingkungan hidup, manakala tidak disertai pengendalian yang bijak.

Dibidang lingkungan alam, hutan yang salah satu fungsi pentingnya sebagai pengatur alami tata air kini menyusut tajam akibat banyaknya alih fungsi penggunaan lahan dan penyerobotan kawasan hutan. Seperti telah disebut di atas, berkurangnya luasan hutan mencapai 1.826.621 hektar dibandingkan dengan kondisi tahun 1999. Hal demikian dapat sangat berbahaya bagi keseimbangan fungsi-fungsi dan mutu setiap komponen lingkungan di Sumatera Selatan. Dan oleh sebab itu adalah layak jika Gubernur Sumatera Selatan telah merumuskan langkah, kebijakan praktis guna penyelamatan hutan Sumatera Selatan, mengingat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat situasional, yaitu : 1. Otonomi Daerah cenderung dipahami secara keliru, sehingga dapat terjadi bahwa kegiatan eksploitasi hutan akan semakin tinggi dalam konteks peningkatan PAD masing-masing daerah (kabupaten); dan 2. bahwa lingkungan hidup pada dasarnya bersifat holistic antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Oleh karena itu eksploitasi SDA tidak dapat hanya bertumpu kepada legitimasi kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota semata, melainkan kebijakan pengelolaan lingkungan lintas Kabupaten/Kota pun mulai dicanangkan dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur Sumatera Selatan telah secara khusus menggariskan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai salah satu dari 4 paradigma pembangunan daerah ini. Sebagai konsekuensinya Bapedalda Provinsi telah meningkatkan peran koordinatornya secara horizontal (lintas sektor dan lintas pesulih guna atau stake holders) serta secara vertical (yaitu lintas Kabupaten/Kota maupun lintas Provinsi).

Pola pikir yang dipakai dalam penyusunan Dokumen ini mengikuti rumus PSR (Pressure, State dan response). Ilustrasi P didukung terutama dengan data dan informasi tahun 2004 dan sebagai data awal 2005. sedangkan S menggambarkan status lingkungan hidup Sumatera Selatan tahun 2005, sehingga R mengindikasikan respons berupa langkah

kebijakan yang telah diambil pada tahun 2005 serta yang disarankan untuk tahun 2006. Oleh sebab itu paparan tentang S (status Lingkungan 2005) dalam dokumen ini benar-benar menggambarkan hasil pemantauan dan pengukuran oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **Halaman**

Abstrak ..... **i**

Daftar Isi ..... **v**

Daftar Tabel ..... **viii**

Daftar Gambar ..... **x**

Daftar Peta ..... **xi**

Daftar Grafik ..... **xii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... I - 1

B. Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ..... I - 4

C. Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD ..... I -5

D. Isu Utama Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 ..... I - 5

1. Banjir ..... I - 8

2. Kependudukan dan Kemiskinan ..... I - 9

3. Urbanisasi ..... I - 10

4. Kesalahan Pengatur Tata Guna Lahan dan Ruang ..... I - 10

5. Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum dan Good Governance .. I - 10

6. Krisis Ekonomi ..... I - 11

7. Gangguan Kawanan Gajah ..... I - 12

8. Kebakaran Hutan dan Lahan ..... I - 12

9. Degradasi Kualitas Ekosistem Daerah Aliran Sungai ..... I - 13

E. Tingkat Kesadaran Masyarakat Sumatera Selatan Dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup ..... I - 14

1. Tatanan Pemerintah ..... I - 15

2. Tatanan Swasta ..... I - 19

3. Tatanan Masyarakat ..... I - 20

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan..... II - 1

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan..... II - 1

2. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan ..... II - 2

3. Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan..... II - 3

4. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 4

B. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Sumatera Selatan ..... II - 7

1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan ..... II - 7

2. Konsepsi Pemanfaatan Ruang Daerah Sumatera Selatan ..... II - 7

3. Arah Pemanfaatan Ruang Daerah Sumatera Selatan ..... II - 8

a. Arah Kebijakan di Bidang Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam..... II - 8

b. Arah Kebijakan Pengendalian Dampak Lingkungan ..... II - 8

C. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya ..... II - 9

1. Kebijakan Pembangunan di Bidang Sosial ..... II - 9

2. Kebijakan Pembangunan di Bidang Ekonomi..... II - 17

3. Kebijakan Pembangunan di Bidang Budaya ..... II - 27

BAB III ANALISIS ISU LH DAN EVALUASI KEBIJAKAN

A. Analisis Isu Lingkungan Hidup ..... III - 1

1. Banjir ..... III - 1

2. Degradasi Kualitas Ekosistem pada Sub DAS (Lematang, Komering, Musi Hilir dan Musi Hulu) ..... III - 9

3. Kebakaran Hutan dan Lahan ..... III - 29

B. Evaluasi Kebijakan ..... III - 40

1. Umum ..... III - 40

2. Penanggulangan Isu-isu LH yang terjadi di Daerah Sumsel ..... III - 41

BAB IV REKOMENDASI

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana ..... IV - 1

B. Penanggulangan Kemiskinan ..... IV - 2

C. Pengembangan Tujuh Bidang Unggulan ..... IV - 4

D. Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah ..... IV - 6

E. Pembinaan Peningkatan Kualitas Masyarakat ..... IV - 7

F. Pengembangan Pemanfaatan Migas, Batubara dan Sumberdaya Mineral Lainnya ..... IV - 8

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran :

1. Daftar Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan/Nara Sumber Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Daftar Nama Daerah dan Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Daftar Nama Kepala dan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Isu-isu Pokok Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan..... I - 6

Tabel 1.2 : Jumlah Bencana Banjir pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.....I - 9

Tabel 1.3 : Kelompok Bidang Penilaian Lomba Penghijauan Tingkat Prov. Sumatera Selatan Tahun 2005..... I - 17

Tabel 1.4 : Perusahaan yang telah membuat AMDAL dan UKL/UPL..... I - 20

Tabel 1.5 : Persentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota pada Tahun 1999-2004.....I - 21

Tabel 1.6 : Penerimaan Kalpataru Prov. Sumsel Tahun 1991 – 2005..... I - 24

Tabel 2.7 : Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan yang belum ditempatkan Menurut tingkat Pendidikan di Prov. Sumsel Tahun 2004..... II - 14

Tabel 3.8 : Banyaknya Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota Sumatera Selatan yang mengalami banjir tiga tahun terakhir 2002-2004 III - 2

Tabel 3.9 : Luas lahan kritis per fungsi kawasan menurut kabupaten/kota III – 3

Tabel 3.10 : Penerimaan penghargaan kegiatan Peringkatan Hari Lingkungan Hidup Prov. Sumsel Tahun 2004 di Kota Pagar Alam.....III - 5

Tabel 3.11 : Penerimaan penghargaan kegiatan Peringkatan Hari Lingkungan Hidup Prov. Sumsel Tahun 2005 di Kota Lubuk Linggau.....III - 6

Tabel 3.12 : Penetapan Identitas Flora Dan Fauna Provinsi, Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2005 ..... III - 8

Tabel 3.13 : Lokasi Pengambilan sampel air pada Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Selatan.....III - 13

Tabel 3.14 : Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004.....III - 19

Tabel 3.15 : Penetapan Lokasi Pemantauan Kualitas Udara pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selata.....III - 24
Tabel 3.16 : Daftar Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER) Tahun 2004 Prov.Sumsel.....III - 26
Tabel 3.17 : Luas dan Kondisi Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 ..... III - 30
Tabel 3.18 : Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2002..... III - 32
Tabel 3.19 : Perkembangan Penyakit Saluran Pernapasan Bagian Atas pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 .. III - 34
Tabel 3.20 : Luas Kawasan Non Hutan yang dikonversi menjadi Hutan menurut Fungsi Hutan pada Kabupaten/Kota Tahun 1998-2005.....III - 38
Tabel 3.21 : Luas Kawasan Hutan yang dikonversi menjadi Non Hutan menurut Fungsi Hutan pada Kabupaten/Kota Tahun 1998-2005.....III - 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Penyerahan Hadiah Lomba dan Penghargaan Kalpataru oleh Gubernur Sumatera Selatan diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 di Kota Lubuk Linggau.....III - 7

Gambar 3.2 : Pipa Penyaluran Minyak Mentah PT. Medco E & P Indonesia Pecah di Desa Sungai Ibul Kecamatan Pendopo Kabupaten Muara Enim pada Bulan April 2005.....III - 20

Gambar 3.3 : Semburan Blow Out Sumur Betun I Pertamina DOH Sumatera Bagian Selatan Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim pada Bulan April 2005..... III - 21

Gambar 3.4 : Meluburnya CPO di Dermaga Pengisian CPO PT. Sinar Alam Permai Kelurahan I Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada Bulan Mei 2005..... III- 21

DAFTAR PETA

Peta 3.1 : Peta Wilayah Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005..... III - 13

Peta 3.2 : Peta kawasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selata..... III - 31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Kondisi Hotspot Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1997-2005 III - 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan tentang pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi atau Earth Summit Tahun 1992 di Rio De Jeneiro, Brazil yang selanjutnya dievaluasi melalui pertemuan World Summit On Sustainable Development (WSSD) di Johanesburg, Afrika Selatan September 2002, yang menghasilan 3 (tiga) dokumen yaitu *"Johanesburg Declaration On Sustainable Development"* program aksi dengan target waktu dan sasaran implementasi pembangunan berkelanjutan *"Johanesburg Plan Implementation"* dan inisiatif kemitraan pembangunan berkelanjutan. Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar dan panduan upaya bersama masyarakat dunia menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan biasanya akan terkendala oleh munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengekploitasinya. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada lingkungan yang akan menjadi masalah, seperti : pencemaran air, udara, tanah, penciutan keanekaragaman hayati, lahan kristis, kebakaran hutan, sampah perkotaan, limbah dan lainnya. Juga keterbatasan, ketidakadilan dan kekurangan pemerataan hak rakyat untuk mengakses sumber daya alam.

Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan tersebut perlu dicermati dengan suatu kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah lingkungan. Suatu kebijakan yang sudah diambil akan tepat sasaran dalam implementasinya apabila adanya informasi yang jelas dan akurat. Kebijakan lingkungan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa kabupaten/kota mempunyai wewenang penuh

mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang dimilikinya secara bertanggung jawab.

Kemudian Undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan menugaskan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerahnya. Pasal 13 ayat 1 Huruf j yo Pasal 14 Ayat 1 huruf j bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi *"Pengendalian Lingkungan Hidup",* sedangkan Pasal 22 huruf k bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi *"Melestarikan Lingkungan Hidup"*. Keperluan tersebut dan guna membuat suatu perencanaan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut kekayaan sumber daya alam suatu daerah, akan memerlukan informasi tentang keadaan profil lingkungan hidup kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah 8.705.742 km^2 dengan jumlah penduduk 6.628.416 jiwa atau kepadatan 0,76 per km^2. adapun batas-batas Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Provinsi Jambi, Sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung, Sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung dan Sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Topografi di pantai timur, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegitasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit kearah barat merupakan dataran rendah yang luas lebih masuk ke dalam wilayah semakin daerahnya bergunung. Terdapat Bukit Barisan dengan ketinggian 900-1200 m dari permukaan laut. Bukit Barisan terdiri atas Puncak Gunung Semenung (1.964 m dpl), Gunung Dempo (3.159 m dpl), Gunung Patah (1.107 m dpl) dan Gunung Bungkuk (2.125 m dpl). Sebelah Barat Bukit Barisan terdapat daerah-daerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian terutama kopi, teh dan sayuran.

Musim yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sama seperti umumnya yang terdapat di Indonesia hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, tetapi waktu musim tidak tepat seperti 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim

penghujan, dengan iklim tropis dan basah dengan curah hujan antara 9/7 – 492/23 mm sepanjang tahun 2004 setiap bulannya hujan cendrung turun *(BPS Sumsel, 2004)*. Sementara bulan Pebruari merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki keragaman alam yang meliputi sumber daya hutan, sumber daya mineral/bahan galian (minyak dan gas bumi, batubara, batu kapur, pasir dan lain-lain) dan sumber daya energi yang cukup besar. Keadaan tanah terdiri dari 11 jenis :

- Organosal, disepanjang pantai dan daratan rendah.
- Litosal, dipinggiran pegunungan terjal.
- Danau Ranau, patahan disepanjang bukit barisan.
- Alluvial, disepanjang Sungai Musi, Lematang, Ogan, Komering dan punggung bukit barisan.
- Hidromorf, didataran rendah Musi Rawas dan Muara Enim.
- Klei Humus, disepanjang pegunungan, pantai, dataran rendah.
- Reqosal, disepanjang pantai timur, dipinggiran pegunungan terjal, danau ranau dan kerucut vulkan.
- Andosal, disemua kerucut vulkan muda dan tua (ketinggian diatas 100 m dari permukaan laut).
- Rendzina, disekitar kota Baturaja.
- Latosal, diwilayah tanah kering.
- Lateritik, dataran rendah disekitar Martapura.
- Podzolik, dataran rendah dan pegunungan Bukit Barisan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi Sumatera Selatan dengan luas kawasan 4.286.517 hektar, terdiri dari 4 Sub DAS yaitu

1. Sub DAS Musi Hulu.
2. Sub DAS Lematang.
3. Sub DAS Ogan dan Komering.
4. Sub DAS Musi Hilir.

Pada wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah

Kabupaten/Kota, pada Tahun 2000 dari 10 Kabupaten/Kota (2 Kota, 8 Kabupaten) berubah menjadi 14 Kabupaten/Kota (4 Kota, 10 Kabupaten) yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir.

B. Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tujuan dari penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2005 adalah :

1. Menyediakan pondasi yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari system pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.

3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), kepentingan penananaman modal (Investor).

4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan *(Good Environmental Govermance)* di daerah, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan *(Bangun Praja)* bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

C. Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD

Informasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup. Pelaporan kondisi lingkungan hidup daerah dibagi atas dua hal, yakni kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan kecenderungan serta data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik data yang bersifat primer maupun sekunder.

Penyusunan basis data lingkungan hidup didasarkan pada data lingkungan hidup yang benar, akurat dan ilmiah, sedangkan mutu analisis dalam laporan Status Lingkungan Hidup tergantung dan didasarkan pada transformasi data dasar yang menjadi suatu informasi berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk pencapaian tujuan bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan, maka evaluasi dan analisis kebijakan dilakukan dengan metode pendekatan Model *Pressure-State-Respon (PSR)*. Model ini membagi informasi secara sistematis untuk sosial ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam dibawah tiga sudut pandang yakni penekanan atau pelaku perubahan lingkungan, asset sumber, dan kualitas lingkungan.

D. Isu Utama Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki letak geografis sebelah utara berbatas dengan Provinsi Jambi, Sebelas Selatan berbatas dengan Provinsi Lampung, Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Bangka Belitung, Sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Bengkulu, sehingga factor keberadaan tersebut diatas menjadi salah satu daya tarik atas minat calon investor untuk melakukan investasi dalam bentuk kegiatan pembangunan terutama dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi disari pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan/ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak negatif maupun posistif terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan hidup disekitarnya diwajibkan memikili/membuat dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17

Tahun 2001 dalam rangka menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam proses pelaksanaan opersional kegiatan di lapangan, masih dijumpai perilaku calon investor/pengusaha tersebut yang belum mengindahkan dan mengacu pada dokumen AMDAL kegiatan yang bersangkutan, dan bahkan ada yang belum memiliki sama sekali dokumen kajian tentang dampak lingkungan baik AMDAL atau UKL-UPL disamping masih dirasakan lemahnya aspek pengawasan penegakan hokum (Law Enforcement) di daerah karena masih kurangnya personil dan lemahnya SDM yang dimiliki sehingga menimbulkan permasalahan/kasus/isu lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.1. Isu-isu Pokok Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP
1	2	3
1.	Banyuasin	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh - Tanah Longsor - Rawan Pangan - Gangguan Gajah
2.	Muara Enim	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh - Rawan Pangan
3.	Musi Banyuasin	- Banjir - Kebakaran - Tanah Longsor
4.	Musi Rawas	- Banjir - Kebakaran
5.	Lahat	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh
6.	Ogan Komering Ilir	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh

		- Rawan Pangan
7.	Ogan Ilir	- Banjir - Kebakaran Lahan Pertanian
8.	Ogan Komering Ulu	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh - Tanah Longsor - Rawan Pangan
9.	OKU Selatan	- Banjir - Gangguan Gajah
10.	OKU Timur	- Banjir - Pendangkalan Sungai
11.	Lubuk Linggau	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh - Tanah Longsor - Rawan Pangan
12.	Pagar Alam	- Banjir - Kebakaran - Angin Puyuh - Tanah Longsor - Rawan Pangan
13.	Palembang	- Banjir - Kebakaran - Kemacetan Lalu Lintas - Pencemaran Air Sungai Musi dan Udara
14.	Prabumulih	- Pencemaran Air, Tanah

Sumber : - BPS Sumatera Selatan 2004

- South Sumatra Forest Fire Management Project.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan di atas, maka untuk Tahun 2004-2005 isu-isu lingkungan hidup yang akan diangkat menjadi isu-isu pokok lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Banjir

Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang selalu terjadi setiap tahun di Provinsi Sumatera Selatan terutama pada musim penghujan, dimana 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang terkena bencana banjir dari 14 kabupaten/kota yang ada. Penyebab utama dari banjir ini diantaranya adalah berkurangnya luas area tangkapan air (cathment area) seperti hutan dan lahan gambut serta seiring bertambahnya luas areal untuk perkebunan, perumahan dan untuk penggunaan lain. Untuk daerah perkotaan seperti Palembang penyebab terjadinya banjir adalah banyaknya sampah pada saluran air, pengaturan tata air (drainase) belum sempurna, pendangkalan sungai Musi. Berdasarkan data yang ada dampak dan kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini adalah rusaknya infrastruktur atau sarana umum yang ada, seperti jalan, perabot rumah tangga, sekolah, jembatan, disamping itu dampak terhadap kondisi sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap terbatasnya ketersedian pangan dan air bersih yang akan mengakibatkan berjangkitnya penyakit pada masyararakat (penyakit diare, batuk pilek dan kulit), hilangnya lahan garapan untuk pertanian.

Tabel 1.2 : Jumlah Bencana Bajir pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2005

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Dampak	
		2004 Kelurahan	2005 Keluarahan	Meninggal	Luka-luka
1	2	3	4	5	6
1.	Ogan Komering Ulu	5	-	-	-
2.	Ogan Komering Ilir	16	-	-	-
3.	Muara Enim	2	-	-	-
4.	Lahat	12	-	-	-
5.	Musi Rawas	3	-	-	-
6.	Musi Banyuasin	2	-	-	-
7.	Banyuasin	4	-	-	-
8.	OKU Selatan	*)	-	-	-
9.	OKU Timur	*)	-	-	-
10.	Ogan Ilir	*)	-	-	-
11.	Palembang	2	-	-	-
12.	Prabumulih	-	-	-	-

13.	Pagar Alam	1	-	-	-
14.	Lubuk Linggau	2	-	-	-
Jumlah		40	-	-	-

Sumber : BPS Sumsel Dalam Angka 2004

*Keterangan *) : Angka masih tergabung dengan kabupaten induk*

2. Kependudukan dan Kemiskinan

   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik paling akhir jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 sebanyak 6.628.416 jiwa yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 153 kecamatan 316 kelurahan dan 2.421 desa. Dengan laju pertambahan penduduk periode 2003-2004 sekitar 1,65 %. Pada Tahun 2005 penduduk Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan menjadi 6.739.773 jiwa (BPS 2004). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 hingga tahun 2005 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, berdasarkan catatan BPS, padahal sebelum terjadi krisis jumlah penduduk miskin cendrung terus berkurang. Penduduk yang terus bertambah jumlahnya dapat menjadi tekanan yang besar bagi lingkungan. Pertambahan pendudukan mendorong ekonomi dan industri tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, air bersih dan energi yang terus meningkat. Apalagi sebagian masyarakat menjalankan pola hidup boros, padahal sumber daya alam terbatas.

3. Urbanisasi

   Data BPS menunjukan jumlah penduduk kota semakin meningkat. Akibatnya kota-kota semakin padat dan sebagian kota-kota terlewati daya dukung lingkungannya. Dengan kata lain, banyak kota-kota sudah tidak layak huni karena menurunnya kualitas lingkungan. Pencemaran udara, pencemaran air sungai dan badan air lainnya oleh limbah rumah tangga dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang tidak tertangani, tidak tersedianya air bersih yang cukup menjadi persoalan hampir semua kota-kota di Indonesia.

4. Kesalahan Pengaturan Tata Guna Lahan dan Ruang

Tingginya daya tarik kota meningkatkan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Meningkatnya penduduk di kota mendorong pembangunan perumahan yang tidak terkendali akibatnya muncul daerah kumuh, perumahan tidak tertata dan tidak teratur, dan ruangan terbuka hijau (taman kota, hutan kota, kebun) menjadi bangunan. Di daerah, hutan diubah menjadi lahan pertanian, lahan pertanian subur diubah menjadi daerah industri dan perumahan. Masyarakat menebang pohon di daerah hulu dan membangun rumah di lereng dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, akibat terjadi bencana longsor dan banjir hingga hilir.

5. Koordinasi Kebijakan, Penegakan Hukum dan Good Govermance

   Konflik antarlembaga pemerintah di daerah dengan pusat atau antar daerah dengan konflik kebijakan daerah-pusat maupun antar daerah terutama mengenai pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi. Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Masyarakat adat, yang sudah terbukti mampu memelihara lingkungannya dengan baik melalui hukum adap dan kearifan tradisional, masih belum diakui penuh keberadaan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Lemahnya penegakan hukum lingkungan dan ringannya sanksi bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan, menambah sulit usaha pelestarian lingkungan. Sudah cukup banyak kasus pelanggaran lingkungan namun belum ada yang diajukan ke pengadilan dan hanya sebagian kecil saja yang dapat terselesaikan, akibat kurangnya sumber daya penegak hukum yang paham mengenai hukum lingkungan. Lemahnya penegakan hukum dalam kasus lingkungan bisa dikurangi dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan lingkungan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam kebijakan dan penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyusun Program Strategis Tahun 2002 berdasarkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta).

6. Krisis Ekonomi

   Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan tekanan pada sumber daya alam semakin tinggi. Dalam skala mikro, penduduk yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan daya beli terdorong untuk melakukan eksploitasi

sumber daya yang ada disekitarnya seperti penebangan kayu hutan berlebihan, pengambilan sumber daya pesisir yang merusak ekosistem pantai/hutan mangrove dan terumbu karang, penebangan illegal dan penangkapan ikan tak terkendali. Dalam sekala makro, sumber daya jika dieksploitasi maksilmal dan cepat bisa mengatasi krisis ekonomi. Sumber daya alam akan dikuras dalam jangka waktu yang pendek sehingga dapat mengganggu kelanjutan pemanfaatannya. Dampak dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga merusak lingkungan dan ekosistem, dirasakan oleh sebagian masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Bencana banjir dan longsor misalnya, menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Hanya sayangnya anggaran sub-sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya satu persen dari seluruh belanja pembangunan atau hanya 0,69 % dari penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam padahal penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan mencapai 77 % (KLH 2002). Sementara akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat meningkatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

7. Gangguan Kawanan Gajah

Permasalahan gangguan kawanan gajah terutama dipicu oleh semakin sempitnya habitat hidup gajah dan juga disebabkan oleh perburuan untuk mendapatkan gadingnya, biaya pemeliharaan yang sangat besar mengakibatkan penyempitan habitat gajah di Provinsi Sumatera Selatan terutama ditekan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di sector perkebunan dimana saat ini perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang memerlukan lahan yang cukup luas dan begitu juga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sehingga kondisi ini secara tidak langsung mengurangi ruang gerak kehidupan gajah dan dikhawatirkan akan dapat memusnakan satwa liar yang dilindungi tersebut.

Dengan semakin semptinya ruang gerak (habitat) akan munculnya permasalahan yaitu timbulnya gangguan satwa ini terrhadap perkebunan masyarakat/swasta. Keterbatasan sumber pakan pada habitat yang sempit mendorong kawanan gajah mencari makan ke daerah diluar habitatnya. Selain itu, umumnya gajah yang memiliki pola perjalanan yang relative konstan pada jalur lintas mencari makan dan bermigrasi. Terganggunya jalur lintas gajah ini akibat pembukaan atau konversi hutan akan menstimulan munculnya gangguan kawanan gajah

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

   Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup serius di Provinsi Sumatera Selatan. Kejadian ini terjadi hamper setiap tahun khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan terhadap kebkaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan dalam usaha perkebunan, pertanian rakyat, serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (illegal logging). Kebiasaan melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara membakar yang tidak dikuti dengan upaya pengendalian api, seperti : pembuatan sekat baker, pengaturan jadwal pembakaran, dan tidak adanya pengawasan terhadap api sehingga menyebabkan api merembet secara tidak terkendali. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak pada berbagai sector, baik kepada perekonomian, transportasi, porduksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan/komplen dari Negara tetangga (Malaysia). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan terutama dipicu oleh unsure kesengajaan dan kondisi alam terutama pada musim kemarau, umumnya terjadi pada lahan bekas tebangan (HPH/HPHTI), lahan perkebunan, lahan masyarakat dan lahan gambut.

9. Degradasi Kualitas Ekosistem Daerah Aliran Sungai

   Didaerah daratan Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 sungai besar yang mempunyai arti penting dari sektor ekonomi terutama sebagai sarana perhubungan dan kegiatan lainnya. Keenam sungai besar tersebut yaitu Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Enim, Rupit dan Rawas. Ketujuh sungai ini membelah dari pergunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara ke pantai pulau Sumatera yang dipengaruhi pasang surut air laut. Sungai Musi merupakan salah satu dari ketujuh sungai yang hulu dan hilirnya berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sedang keenam sungai lainnya (Ogan, Musi Komering, Lematang, Enim, Rupit dan Rawas) hulunya berada pada Provinsi Sumatera Selatan. Dengan begitu cepatnya perkembangan pembangunan ekonomi dalam berbagai bentuk kegiatannya maka secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap keberadaan ekosistem yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Banyaknya aktivitas seperti pembukaan lahan (land clearing) untuk sector pertanian dan

perkebunan yang dilakukan oleh pihak pemukiman, dan aktivitas penambangan serta aktivitas kegiatan lainnya yang pada giliran akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut, termasuk keberadaan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Disamping itu, dengan banyaknya aktivitas tersebut terutama sector industri juga akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan terutama terhadap kualitas air sungai yang merupakan komponen lingkungan yang perlu dipertahankan kualitas maupun kuantitasnya

E. Tingkat Kesadaran Masyarakat Sumatera Selatan Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Tujuan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat untuk saat sekarang, tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat keberlanjutan pada masa depan. Dengan konsep demikian dapat ditempuh dengan mengintegrasikan aspek lingkungan pada setiap kegiatan pembangunan, maksudnya sebelum suatu kegiatan pembangunan dilaksakan, selain kelayakan ekonomis dan teknis yang diperhatikan namun perlu juga dilihat dari segi kelayakan secara social dan ekologis atau lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu daerah sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada di daerah tersebut. Kerjasama yang baik antar setiap komponen tersebut akan memberikan hasil sinergis guna percepatan perbaikan lingkungan hidup. Komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tingkat kesadaran dan peranserta lapisan masyarakat.

Tingkat kesadara masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, maka apapun yang dilakukan pemerintah daerah hasilnya tidak akan maksimal.

Dari hasil investarisasi terhadap isu-isu lingkungan hidup kabupaten/kota Tahun 2004-2005 yang merupakan juga isu lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan

secara umum tidak jauh berbeda dengan isu lingkungan yang mengemuka tahun 2003. hal itu pertanda bahwa otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 masih belum begitu efektif dalam memajukan pembangunan lingkungan hidup daerah ini. Sepintas masih terlihat bahwa target pembangunan ekonomi hanya untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, ketimbang pembangunan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah dalam pembangunan lingkungan terlihat masih belum optimal. Namun demikian telah terlihat kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana kebijakan-kebijakan (Political Will) pemerintah telah mulai terlihat dalam pembangunan lingkungan hidup di daerah.

1. Pada Tatanan Pemerintah
    a. Wilayah Administrasi Pemerintahan

        Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Kabupaten Bangka, Belitung dan Pangkal Pinang yang semula menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi tersendiri, seiring dengan perkembangan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan kembali terjadi pemekaran wilayah dengan peningkatan status 3 kota administratif menjadi kota sehingga wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi 7 Kabupaten dan 4 Kota terdiri dari :

        a.1. Kabupaten Musi Banyuasin
        a.2. Kabupaten Ogan Komering Ulu
        a.3. Kabupaten Ogan Komering ILir
        a.4. Kabupaten Muara Enim.
        a.5. Kabupaten Lahat.
        a.6. Kabupaten Musi Rawas
        a.7. Kabupaten Banyuasin
        a.8. Kota Palembang
        a.9. Kota Prabumulih
        a.10. Kota Lubuk Linggau
        a.11. Kota Pagar Alam

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU, Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan terjadi pula pemekaran wilayah administrasi Pemerintah Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan serta Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, sehingga wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 kabupaten dan 4 kota, 151 kecamatan, 312 kelurahan, 2.421 desa *(Lakip 2004, BPS)*.

b. Lomba Penghijauan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mulai tahun 1999-2005 telah melaksanakan lomba penghijauan untuk masing-masing ibukota kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan dengan criteria penilaian mengacu kepada criteria pelestarian lingkungan dimana dalam pelaksanaan penilaian melibatkan instansi teknis terkait dengan mendapat bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.

Dalam tahun 2005 penilaian lomba penghijauan dilakukan pada 7 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Musi Rawas, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Lahat dengan kelompok penilaian yaitu :

- Bidang Penyuluh Kehutanan lapangan, jumlah kreteria 6 kolompok dengan bobot 100%.
- Bidang Polisi Kehutanan, jumlah kreteria 5 kelompok dengan bobot 100%.
- Bidang Kader Konservasi Alam (KKA), jumlah kreteria 6 kelompok dengan bobot 100%.
- Bidang Tani Penghijauan, jumlah kreteria 4 kelompok dengan bobot 100%.
- Bidang Bupati/Walikota Peduli Kehutanan syarat umum telah menjabat 2 tahun, jumlah kreteria 5 kelompok dengan bobot 100%.

Sedangkan bidang penilaian lomba penghijauan dubagi kelompok hasil penilaian berdasarkan jumlah nilai yang dikumpulkan yaitu Bidang Rehabilitasi meliputi : Penyuluh Kehutanan Non Lapangan dan Petani Penghijauan dengan unsur hutan rakyat, Bidang Konservasi meliputi : kelompok pencinta alam,

polisi kehutanan, kader konservasi alam, Bidang Peduli Kehutanan yaitu Para Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.

Tabel 1.3 : Kelompok Bidang Penilaian Lomba Penghijauan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005

No	Kelompok Penilaian	Unsur/Kegiatan
1	2	3
1.	Bidang Rehabilitas	- Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) - Petani Penghijauan dengan objek Hutan Rakyat
2.	Bidang Konservasi	- Kelompok Pencinta Alam (KPA) - Polisi Kehutanan
3.	Bidang Peduli Kehutanan	- Kader Konservasi Alam - Bupati/Walikota

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005

Dari 7 kabupaten/kota yang dilakukan penilaian penghijauan, untuik tahun 2005 tidak satupun yang berhasil memperoleh kategori sangat baik, namun predikat tertinggi yang diperoleh adalah predikat baik. Predikat baik untuk masing-masing kelompok/jenis lomba ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/KPTS/HUT/2005 tanggal 30 Agustsu 2005 tentang Pemenang Lomba Penghijauan dan Penghargaan Bupati/Walikota Peduli Kehutanan Tahun 2005. Hasil penilaian lomba penghijauan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 berdasarkan hasil penilaian administrasi tehnis lapangan/fisik.

c. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2004-2005 sesuai kewenangannya telah melakukan penetapan Baku Mutu terhadap kualitas air sungai dan kualitas udara. Penetapan tersebut ditetapkan dalam bentuk

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Baku Mutu Kualitas Air dan Kualitas Udara adalah sebagai berikut :

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu air Sungai.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Ambient dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair (MBLC) bagi kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara.

Selain beberapa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan di atas, terdapat Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Laboratorium Lingkungan Pemerintah. Pada Tahun 2004 Laboraorium Lingkungan bapedalda Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 2284/3.22/LP/09/2004 tanggal 30 September 2004 ditetapkan sebagai laboratorium Terakreditasi.

d. Pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Program Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan merupakan program kegiatan pembinaan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, ketaatan dari kegiatan/usaha dalam pengelolaan lingkungannya. Sedangkan kegiatan penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dengan autput adalah peningkatan ketaatan pihak perusahaan dalam pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan limbah (cair, padat), pencemaran udara, tanah (limbah padat).

e. Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi setiap tahun, dengan kegiatan lomba melukis lingkungan hidup diikuti oleh siswa sekolah dasar, lomba kebersihan pasar,

pemberian penghargaan kalpataru, penanaman tanaman yang berfungsi konservasi di lokasi/lahan kritis pada daerah tempat pelaksanaan Upacara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup tersebut.

f. Pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara dilaksanakan pada 14 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan baik pada lokasi lintas kabupaten/kota maupun pada lokasi lintas Provinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung dengan jumlah titik 72 (kualitas air) sedangkan 55 titik untuk kualitas udara ambient.

2. Tatanan Swasta

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan hal sebagai berikut : Pasal 18 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapatan masyarakat dan pertimbangan-rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha kegiatan tersebut.

Pada tatanan swasta, komitmennya terhadap lingkungan dirasa masih sangat rendah. Masih banyak perusahaan yang belum mengikuti kaidah-kaidah penyelamatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan dalam berusaha. Belum mematuhi arahan-arahan yang tertuang dalam dokumen AMDAL yang dimilikinya atau belum memiliki dokumen AMDAL sama sekali. Tidak memanfaatkan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) dengan baik atau sama sekali tidak melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Sehingga tidak mampu lagi ditmpung oleh daya dukung (carrying capacity) ekosistem lingkungan itu sendiri.

Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwa setiap melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan usaha (industri) telah mulai menyadari akan kewajibannya

mengelola lingkungannya dalam berusaha, dimana telah mulai menerapkan konsep Produksi Bersih dalam berusaha, seperti persyaratan Ecolabelling dan ISO 14000.

Tabel 1.4. Perusahaan yang telah membuat AMDAL dan UKL-UPL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Jumlah Kegiatan Terdokumen (Buah)	Dokumen AMDAL (Buah)	Dokumen UKL-UPL (Buah)
1	2	3	4	5
1.	Industri	11	2	7
2.	Perkebunan	10	8	1
3.	Eksplorasi	3	1	2
4.	Pertambangan	1	1	-
5.	Pengembangan Gas dan Minyak	3	3	-
6.	Instalasi Penimbunan	3	3	-
7.	Rumah Sakit	1	-	1
8.	Pengembangan Unit Dermaga	1	-	1
9.	Pusat Perdagangan	1	-	1
Jumlah		33	16	14

Sumber : Bapedalda Prov. Sumsel

3. Tatanan Masyarakat

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga bervariasi selain didukung oleh tingkat kesejahteraan dan pendidikan juga didukung oleh keragaman demografis/etnis. Secara umum tingkat kesadaran masyarakat Sumatera Selatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup belumlah begitu menggembirakan. Namun demikian, sudah tampil beberapa kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup yang sehat dan serasi, seperti masyarakat Pembina lingkungan, perintis lingkungan dan penyelamat lingkungan. Bertambahnya angka

kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan disamping pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan secara liar (illegal logging).

Tabel 1.5. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota pada Tahun 1999-2004

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2004		
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk Miskin (jiwa)	Persen (%)
1	Banyuasin	712.813	147,3	20,66
2	Lahat	541.895	160,2	29,56
3	Lubuk Linggau	171.235	28,0	16,35
4	Muara Enim	621.876	138,3	22,24
5	Musi Banyuasin	455.739	164,4	36,06
6	Musi Rawas	465.682	164,0	35,22
7	Ogan Ilir	365,056	15,9	4,35
8	Ogan Komering Ilir	675.096	125,0	18,51
9	Ogan komering Ulu	278.645	115,0	41,27
10	OKU Selatan	286.959	26,9	9,09
11	OKU Timur	547.995	59,5	10,86
12	Pagar Alam	113.752	17,0	14,94
13	Palembang	1.304.211	124,1	9,51
14	Prabumulih	128.207	94,0	7,33
	Jumlah	6.628.416	.1379,1	20,80

Sumber : BPS Prov. Sumsel Tahun 2004

Besarnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh naiknya harga bahan bakar minyak dipasaran disamping secara menunjukan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup antara lain memanfaatkan halaman/pekarangan rumah dengan menanam tanaman apotik hidup serta melakukan pemanfaatan terhadap kasus-kasus lingkungan.

Beberapa bentuk permasalahan/kasus-kasus/isu lingkungan yang terjadi di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 antara lain :

- Pencemaran oleh pabrik Caltix PT. Swasti Paramita Mulya di desa Sukamerindu Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim.

- Tuntutan ganti rugi warga desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terhadap colok api lapangan stasiun minyak Jatamatra PT. Exspan Nusantara.

- Tuntutan wagra desa Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap debu yang dikeluarkan oleh Pabrik Semen Baturaja

- Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat petani Desa Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin terhadap tanah timbunan PT. Medco E & P yang hanyut masuk sawah seluas 10 Ha.

- Tuntutan warga Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap kegiatan tambang prosi mekanis CV. SS yang mencemari Sungai rasau tersebut.

- Tuntutan masyarakat Kota Prabumulih terhadap bocotnya pipa minyak Pertamina DOH Prabumulih (pipa minyak Sea Union Energi Ltd Jalur BEL 007-BEL 009).

- Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat Karang Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas terhadap limbah Eks BTM.
- Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat Kelurahan Talang Kelapa dan Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang terhadap bocornya pipa minyak PT. Conoco Phillip yang mencemari daerah tersebut.

- Tuntutan masyarakat Desa Prajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin terhadap pencemaran pabrik PT. Sinar Alam Permai (SAP) melalui surat Aswari (Asiosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia).
- Tuntutan masyarakat Desa Cepsodasi Kecamatan Jaya Loka Prabumulih melalui Harian Sriwijaya Post terhadap limbah minyak Pertamina DOH Prabumulih.

- Tuntutan masyarakat Kelurahan 1 Ilir Palembang terhadap Pabrik PT. PUSRI melalui Harian Sriwijaya Post bahwa adanya ikan mati di Sungai Musi dekat pabrik tersebut, diduga akibat pencemaran pabrik PT. PUSRI.

- Tuntutan masyarakat sekitar pabrik PT. Saripati Abadi (SPA) Betung Kabupaten Banyuasin melalui surat kabar Harian Palembang Post terhadap limbah domistek Mess Karyawan Pabrik tersebut.
- Tuntutan ganti rugi masyarakat Desa Betun Kabupaten Muara Enim melalui Harian Sumeks terhadap pencemaran minyak yang diakibatkan oleh sumur minyak Pertamina DOH Sumbagsel terjadi "Blow Out".

- Tuntutan masyarakat sekitar pabrik terhadap pencemaran pabrik Crumb Rubber PT. Lingga Jaya Kabupaten Muara Enim.

- Tuntutan ganti rugi masyarakat Desa Sialinga, Desa Lubuk Ketam Kabupaten Muara Enim terhadap pencemaran minyak sumur TT 63 Tlj No.260/123/141/SP.VII Pertamina DOH Sumbasel terhadap lahan masyarakat daerah setempat.

Disamping itu mulai muncul tindakan atau partisipasi masyarakat yang dapat menggembirakan berupa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Musi Hutan Persada dengan kegiatan Mengelola Hutan Bersama Rakyat (MHBM), penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Penghargaan Lomba Penghijauan, Lomba Lukis Lingkungan Hidup siswa Sekolah Dasar dan Lomba Kebersihan Pasar.

Penerimaan penghargaan Kalpataru yang telah diperoleh kelompok masyarakat atau perorangan di Provinsi Sumatera Selatan baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional dari tahun 1991 sampai tahun 2005 sebagai berikut :

Table 1.6 : Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1991 s.d. 2005.

No	Nama	Kegiatan	Kategori Penghargaan	Tahun
1	Kelompok Tani Desa Air Mayau Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Lahat	- Rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman yang bernilai ekonomi (Jati, Kemiri. - Pemanfaatan sumber daya air dengan memelihara ikan yang dikonsumsi masyarakat setempat	- Penyelamat Lingkungan Tingkat Nasional	1991
2	Usman Kampung Tanding 2B Ds. Bumi Agung Kec. Muara Enim Kab. OKU Selatan	- Pengembangan 6 jenis bibit ikan. - Penghijauan pd lahan kritis - Pemeliharaan mata air	- Pembina Lingkungan Tk. Prov.	2002
3	Hermansyah Ds. Cempaka Kec. Cempaka Kab. OKU Timur	- Merintis pemanfaatan lahan tidur dgn tanaman jeruk siam seluar 6 Ha - Menanam pohon bambu ditepi sungai Komering	- Perintis Lingkungan Tk. Prov.	2003
4	Budi Suyanto Jl. Taman Murni 51 Rt.1 Kp.II Kec. Gunung Ibul Kt. Prabumulih	- Menata apotik hidup masyarakat. - Menggerakan/membangunan gedung Koperasi, PKK dgn biaya swadaya masy. - Menghibahkan tanah utk membangun masjid di sekolah	- Perintis Lingkungan Tk. Prov.	2004
5.	Sanderson, ST Jl. Beringin Blok C 58 A Kel. Bandar Jaya Kab. Lahat	- Upaya pencegah pencemaran air dgn memanfaatkan tumbuhan A2011a utk perbaikan fungsi air, memper-cepat pengembangbiak-an ikan air tenang melalui budidaya planton, sejak 1996.	- Pembina Lingkungan Tk. Prov.	2005
6	Boimin Jl. Sepakat Rt.2 Ds.	- Pembuatan Checkdam dan siring sepanjang 800	- Perintis Lingkungan	2005

	Eka Marga Kt. Lubuk Linggau	m utk mengaliri lahan kritis.	Tk. Prov.	
7.	Suryanto Jl. Raya Terawas Rt.I Ds. Suka Karya Bkl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas	- Penanaman dan pemeli-haraan tanaman hutan, pembuatan saluran air pada bukit Cogong, Botak, Gantin dan Kecil seluas 1.450 Ha sejak 1987	- Penyelamat Lingkungan Tk. Prov.	2005

BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

F. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

   Komitmen pembangunan Sumatera Selatan adalah Bersatu Lebih Maju, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2003-2008 adalah *"Sumatera Selatan 2008 Bersatu Lebih Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Global dengan Menerapkan Otonomi Daerah secara Murni dan Konsekuwen"*.

   Konsepsi pembangunan perekonomian dan komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada hakekatnya mengandung prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Amanat tersebut tercermin dalam salah satu rumusan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah *"mengoptimalkan pemberdayagunaan potensi berbagai sumberdaya secara berkelanjutan berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Sumatera Selatan terhadap pasar global, nasional dan internasional dan meningkatkan pengembangan bidang-bidang unggulan guna mempercepat industri serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah"*.

   Tujuan strategis pembangunan daerah berkelanjutan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan. Misi merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan. Tujuan tersebut dikembangkan berdasarkan kriteria : akseptabilitas : dapat diterima oleh seluruh stakeholders, fleksibilitas : mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang dapat diukur, pendorong kinerja, kesesuaian dengan visi dan misi, mudah dipahami.

2. Arah kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan

Kebijaksanaan pembangunan daerah Sumatera Selatan mengarah ke isu-isu strategis yang meliputi prospek pembangunan dan prospek pemerintah diantaranya :

2.1. Prospek Pembangunan, meliputi :

i. Pemberdayaan Desa (sarana prasarana fisik dan kelembagaan)
ii. Pemberlanjutan Bina Unggulan, yakni Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri Kecil dan Menengah dan Kerajinan Rakyat, Pariwisata serta Kelautan dan Perikanan.
iii. Pembangunan jaringan kelembagaan ekonomi internal, pembangunan jaringan perdagangan eksternal yang ditopang oleh sinergi kekuatan pemerintah, masyarakat umum dan dunia swasta.
iv. Peningkatan belanja pembangunan untuk program-program strategis melalui diplomasi pengumpulan dana pihak ketiga termasuk dana pinjaman dalam dan luar negeri.
v. Perletakan kekuatan dasar pembangunan jangka panjang ke depan melalui perkuatan fungsi dan peran sector pendidikan dan sector kehutanan.

2.2. Prospek Pemerintahan, meliputi :

a. Rumuskan dan implementasikan aneka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program pacu pertumbuhan sector riil difasilitasi dengan kemudahan birokrasi serta memaksimalkan daya pungut pajak dan retribusi tanpa membebani rakyat kecil.
b. Rumusan dan implementasikan percepatan kelengkapan sarana prasarana bagi peningkatan enam sector unggulan yang terus dikembangkan.
c. Rumuskan dan implementasikan tambahan porsi anggaran belanja untuk peningkatan imtaq dan iptek bagi generasi muda dengan memperhatikan ke khasan potensi ekonomi wilayah setempat.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khusus Pasal 12 dan 13 menyerahkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolan lingkungan hidup. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah, kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagian penggantian Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah perlu diikuti restrukturisasi dan reposisi kelembagaan serta tata laksana pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan salh satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Sumatera Selatan meliputi :

1. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah disemua sektor oleh setiap lapisan masyarakat.
2. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelembagaan dibidang lingkungan hidup yang lemah dan kredibel.
3. Membentuk jaringan kelembagaan lingkungan dan kekuatan sumber daya manusia penunjang lintas kabupaten/kota se Sumatera Selatan.
4. Memacu peran pengusaha dan industriawan agar memiliki keunggulan kompetetif melalui kebijakan integrasi pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tahapan management.
5. Mengembangkan peran serta masyarakat maupun kepatuhan publik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

3. Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2003-2008 maka ditetapkan visi pengelolaan lingkungan hidup adalah *"Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan"*. maka ditetapkan misi pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

i. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan disemua sector dan bidang.
ii. Menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan kelembagaan bidang lingkungan hidup.
iii. Membentuk dan menguatkan jaringan kelembagaan lingkungan untuk menunjang kabupaten/kota se Sumatera Selatan.

iv. Memacu dan mengembangkan peran serta pengusaha, dunia usaha, masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan penyusunan rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 antara lain memberikan landasan formal dan ideal bagi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, melestarikan informasi tentang kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup 2003-2008 adalah terwujudnya perencanaan pelaksanaan dan pengendalian lingkungan hidup yang mengarah kepada perwujudan visi daerah.

4. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, strategi pengelolaan lingkungan hidup daerah dapat dilakukan dengan :

i. Secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan didaerah, membina kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar lembaga dan kerjasama luar negeri dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah.

ii. Mempersiapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara bertahap dari kebijakan makro, sampai pedoman teknis operasional pelaksanaan sesuai mekanisme yang ada.

iii. Mengembangkan, membina dan menyelenggarakan forum-forum konsolidasi, koordinasi dan diskusi baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan lingkungan, dengan melibatkan seefektif mungkin partispasi lembaga terkait, kabupaten/kota dan komponen masyarakat umumnya.

iv. Pengkajian dampak lingkungan, penatalaksanaan AMDAL, pembinaan komis AMDAL Provinsi dan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota, Koordinasi dalam penilaian, pemantauan dan evaluasi AMDAL bersama Kabupaten/Kota.

v. Secara terkoordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan kabupaten/kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan teknologi produksi bersih di daerah, penerepan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan penataan perizinan lingkungan.

vi. Secara terkoordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan kabupaten/kota, melakukan kegiatan pengendalian perusakan lingkungan, pemantauan, pemulihan fungsi dan daya dukung lingkungan serta pelestarian sumberdaya dan keanekaragaman hayati di daerah.

vii. Secara terkoordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan kabupaten/kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pelestarian SDA dan daya dukung lingkungan di daerah.

viii. Meningkatkan kesadaran masyarakat, membina peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, pengembangkan system data base dan informasi lingkungan dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

Adapun implementasi dari pada Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan program-program sebagai berikut :

1. Program Pokok meliputi :
    a. Program Pengendalian dan Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pemulihan kerusakan hutan, tanah dan air, pengelolaan kawasaan pesisir dan laut, konservasi dan pelestarian sumber daya alam hayati dan daya dukung lingkungan hidup.

    b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian

pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan dan menurunya kualitas lingkungan didaerah. Kegiatan ini meliputi Penanganan Kasus, Pemantauan Kualitas Limbah, Perizinan Limbah, Evaluasi Kualitas Lingkungan, Pembinaan dan Pengembangan Tehnologi Pengolahan Limbah dan Produksi Bersih di Daerah.

2. Program Strategis :

   Adalah Program Pengelolaan Sumber daya Air dan Konservasi Hutan meliputi kegiatan :

   a. Evaluasi Kualitas Air dan Udara
   b. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
   c. Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Daerah
   d. Evaluasi Sumber Cemar Lingkungan Hidup.
   e. Penyusunan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup Daerah
   f. Sosialisasi Program Penegakan Hukum Lingkungan.

3. Program Prioritas :

   1. Program Pengelolaan Limbah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan meliputi kegiatan :
      a. Pembinaan Peringkat Kinerja Kelola Lingkungan Hidup (PROPER).
      b. Penanggulangan Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup.
      c. Pengawasan pelaksanaan Kelola Lingkungan ANDAL, RPL-RPL, UKL-UPL.
      d. Peningkatan Laboratorium

   2. Program Peningkatan Partisipasi dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi kegiatan :
      e. Pekan Lingkungan Indonesia Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
      f. Penghargaan Kalpataru.
      g. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
      h. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL).
      i. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup.

G. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Sumatera Selatan

1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan

   Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 yang selanjutnya di implementasikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan daerah masing-masing yang menyesuaikan dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Tata ruang ditempatkan sebagai salah satu instrument pengendalian dan meminimalisasikan dampak negative dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan ini terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Konsepsi Pemanfaatan Ruang Daerah Sumatera Selatan

   Dalam menindaklanjuti aturan pemanfaatnan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan agar pengendalian dampak negative pembangunan dapat dicapai secara efekti maka Pemerintah Provinsi melalui instrument tata ruang telah melakukan langkah-langkah :

   i. Penyedian/Penyusunan dan pemutahiran Rencana Umum Tata Ruang Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
   ii. Pengembangan Rencana Umum Tata Ruang menjadi detail Rencana Tata Ruang sampai ke tingkat kecamatan.
   iii. Menempatkan aspek tata ruang sebagai pertimbangan utama dalam setiap rencana pembangunan.
   iv. Peningkatan tindakan/sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang.

3. Arah Pemanfaatan Ruang Daerah Sumatera Selatan

   Guna mendekati tujuan pembangunan Sumatera Selatan maka bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan menerapkan 2 (dua) arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Sumatera Selatan dalam pemanfaatan ruang daerah yaitu :

   i. Arah Kebijakan di Bidang Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam :
      a. Pengelolaan sumberdaya alam dengan prinsip peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan keserasian dan daya dukungnya.
c. Peningkatan potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan dengan melakukan kegiatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan keragaman sumberdaya melalui tehnologi ramah lingkungan.
d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada diwilayahnya.

ii. Arah Kebijakan Pengendalian Dampak Lingkungan :

a. Penyediaan Baku Mutu Lingkungan sebagai standar kelola lingkungan oleh berbagai kalangan.
b. Pengendalian pencemaran lingkungan.
c. Peningkatan pengetahuan tehnis kelola lingkungan pada jajaran birokrasi, dunia usaha dan masyarakat umum di Sumatera Selatan.
d. Peningkatan penerapan produksi bersih, produksi lestari di kalangan dunia usaha dan masyarakat.
e. Penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian secara adil dari berbagai sengketa lingkungan dalam masyarakat.

H. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Kebijakan Pembangunan di Bidang Sosial

Pembangunan dibidang social mencakup bidang-bidang kependudukan transmigrasi, pendidikan, ilmu pengetahun dan tehnologi, penelitian dan pengembangan, kesehatan dan keluarga berencana, kesejehteraan social, pemuda dan olah raga, agama, pemberdayaan perempuan. Adapun arah kebijakan pembangunan dibidang social adala sebagai berikut :

1.1 Kependudukan

Arah kebijakannya ditekankan kepada pengendalian tingkat kelahiran penduduk, pemerataan sebaran penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penciptaan lapangan kerja bagi penduduk. Pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun sebesar 109.625 orang (1,68%) yaitu dari 6.518.791 orang (2003)

menjadi 6.628.416 orang (2004). Dari arah kebijakan tersebut maka capaian target yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1.1.1. Tersusunnya administrasi kependudukan yang lengkap, sistimatis.

1.1.2. Terkendalinya perkembangan penduduk.

1.1.3. Terkendalinya migrasi penduduk di Sumatera Selatan.

1.1.4. Semakin meratanya distribusi penduduk.

1.2 Pendidikan, Iptek dan Litbang

Arah kebijakannya ditujukan kepada menyediakan, menambah, memperbaiki kualitas prasarana/sarana pendidikan formal, mendorong minat penguasaan ilmu dan teknologi di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat, mendorong minat masyarakat terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pencapaian target yang diinginkan dari arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1.2.1. Meningkatnya pendidikan formal rata-rata penduduk Sumatera Selatan.

1.2.2. Hilangnya / mengecilnya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

1.2.3. Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat.

1.2.4. Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Sumatera Selatan.

1.3 Pelayanan Kesehatan

Kebijakannya diarahkan kepada penyediaan yang cukup dan merata, peningkatan kualitas / mutu dari prasarana / sarana atau fasilitas kesehatan dan keluarga berencana bagi masyarakat luas. Capaian target yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.

1.3.2. Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

1.3.3. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat Sumatera Selatan.

1.4 Kesejahteraan Sosial

ada 5 (lima) variabel yang bisa dijadikan indicator untuk menggambarkan kesejahteraan social Sumatera Selatan. Kelima variable tersebut yaitu pendidikan, kesehatan dan keluargaan berencana, peradilan, agama dan kesejahteraan social.

1.4.1 Pendidikan

Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Sumatera Selatan baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2003/2004 sebanyak 610 sekolah taman kanak-kanak, 4577 sekolah dasar, 796 sekolah lanjutan pertama dan sebanyak 472 sekolah menengah umum dan kejuruan. Untuk masing-masing tingkatan sekolah ini digunakan oleh sejumlah murid, sekolah negeri maupun swasta yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Selama tahun

ajaran 2003/2004 terdapat muri taman kanak-kanak sebanyak 29.717 org, sekolah dasar sebanyak 901.408 orang dan murid sekolah lanjutan pertama sebanyak 275.415 sedangkan murid sekolah menengah umum /kejuruan berjumlah 181.940 orang.

Tenaga guru yang tersedia pada tahun ajaran 2003/2004 pada masing-masing sekolah adalah taman kanak-kanak sebanyak 2.134 orang, sekolah dasar sebanyak 42.476 orang, sekolah lanjutan tingkat pertama 17.088 orang, sekolah menengah umum/kejurunan sebanyak 11.377 orang guru. Jika dibandingkan dengan data tahun ajaran sebelumnya jumlah guru yang tersedia untuk TK, SLTP dan SLTA mengalami peningkatan *(BPS Sumsel 2004)*.

1.4.2 Kesehatan dan Keluarga Berencana

Jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2004 masing-masing berjumlah 39 unit, 221 unit dan 944 unit yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah dokter (umum , spesialis dan gigi) pada tahun 2003 ada 896 orang dan tahun 2004 menjadi 746 orang, sementara jumlah perawat dan bidang serta tenaga kesehatan lainnya pada tiga tahun terakhir yaitu : berjumlah perawat dan bidang sebanyak 5.008 orang(2001), 3.420 orang (2002) dan 5.438 orang (2003).

Peserta keluarga berencana baru di Sumatera Selatan pada tahun 2004 telah melampaui target (102,92 %) dari 122.510 peserta yang ditargetkan ternyata realisasi mencapai 229.014 peserta.

1.4.3 Agama

Tahun 2004 pengikut agama Islam 94,2 persen, Budha 1,77 persen, Khatolik 1,19 persen, Kristen 1,76 persen dan Hindu 1,08 persen.

1.4.4 Kesejahteraan Sosial

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 22 jenis penyandang masalah kesejahteraan social dari 22 jenis terdapat beberapa jenis yang dominan diantaranya fakir miskin 235.591 KK, anggota masyarakat yang tak layak huni 47.945 KK, yang ditempati oleh 44.158 orang (daerah rawan bencana).

Bertolak dari berbagai permasalahan di atas, maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1.4.1. Peningkatan kualitas pelayanan dan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

1.4.2. Perluasan jangkauan pelayanan dan usaha kesejahteraan sosial yang merata dan adil.

1.4.3. Peningkatan gerakan swadaya masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS).

1.4.4. Peningkatan penyediaan fasilitas perumahan.

1.4.5. Peningkatan penyediaan fasilitas air bersih.

1.4.6. Penyediaan Peraturan Daerah yang lebih menjamin keberlangsungan pembangunan kesejahteraan sosial.

1.5 Ketenaga-kerjaan

Pertumbuhan penduduk tinggi akan diiringi oleh besarnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sedangkan kondisi senyatanya yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi sejak 1998 sampai sekatang, banyak tenaga kerja yang dilepas, akibat menurunya kapasitas produksi dalam negeri, sehingga mendorong bertambahnya pengangguran di Sumatera Selatan. Pada tahun 1999 mencapai 5.50 persen sedangkan dalam tahun 2004 pencari kerja meningkat pesat diiringi UMR yang rendah, oleh karena itu kebijakan pembangunan di bidang ketenaga-kerjaan diarahkan kepada :

1.5.1. Peningkatan keterampilan angkatan kerja.

1.5.2. Peningkatan peran bursa tenaga kerja bagi akses tenaga kerja Sumatera Selatan menjangkau pasar kerja dalam dan luar negeri.

1.5.3. Peningkatan kemampuan usaha mandiri bagi angkatan kerja.

1.5.4. Perbaikan Upah Minimum Regional Sumatera Selatan.

Tabel 2.7. Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan yang belum ditempatkan menurut tingkat pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Jenis Pendidikan	Pendaftaran (orang)	Penempatan (orang)	Belum ditempatkan (orang)
1	SD	279	234	45
2	SLTP	1.167	836	331
3	SMU	25.195	4.286	20.909
4	Sarjana Muda	8.893	931	7.962
5	Sarjana/Master	7.281	912	6.369
Jumlah		**42.815**	**7.199**	**35.616**

Sumber : BPS Sumsel Tahun 2004

1.6 Pemuda dan Olahraga

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menakjubkan telah berdampak kepada globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Penetrasi berbagai budaya sangat mudah dan cepat melanda berbagai kalangan / kelompok lain termasuk generasi muda. Olah karena itu dalam upaya mencegah dan/atau memperkecil dampak negatif berbagai budaya lain yang dapat merusak generasi muda di Sumatera Selatan, maka kebijakan dibidang pemuda dan olahraga diarahkan kepada :

1.6.1. Peningkatan wawasan dan kualitas keagamaan pada kalangan muda.

1.6.2. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

1.6.3. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas organisasi kepemudaan.

1.6.4. Penciptaan iklim yang menunjang bagi berkembangnya wawasan kewirausahaan pemuda.

1.6.5. Pengembangan dan pembudayaan olahraga melalui pelaksanaan PON XVI di Palembang.

1.6.6. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga seperti pembuatan GOR, Kolam Renang dan sebagainya.

1.6.7. Peningkatan pendidikan, penelitian, pengembanganna ilmu pengetahuan dan teknologi, serta olahraga

1.7 Agama

Pendidikan agama merupakan salah satu bagian penting dari pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan kerukunan hidup beragama adalah bagian lain yang tak kurang penting bagi keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan oleh sebab itu maka kebijakan di bidang agama di Sumatera Selatan diarahkan kepada :

1.7.1. Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama.

1.7.2. Peningkatan wawasan saling menghargai antar penganut agama, sehingga tetap tercipta hubungan yang sinergis antar umat

beragama dalam memperkuat kerukunan hidup beragam di Provinsi Sumatera Selatan.

1.8 Pemberdayaan Perempuan

Ketinggalan perempuan dalam pendidikan merupakan salah satu sebab adanya perbedaan akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai partisipasinya terhadap pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari angka statistik yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang tamat pendidikan tinggi mencapai angka 2,1 %, sedangkan perempuan hanya 1,4 %. Di bidang politik perempuan lebih banyak berperan pasif. Pada lembaga DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, komposisi perempuan hanya rata-rata 10 % dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga dalam birokrasi, untuk jabatan-jabatan struktural, peran perempuan jauh tidak seimbnag dengan peran laki-laki. Dari kondisi yang tersebut di atas, maka kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan kepada :

1.8.1. Memasuki dimensi jender pada seluruh proses dan tahapan pembangunan.

1.8.2. Penghapusan diskriminasi kepada perempuan dalam berbagai akses/peran untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.8.3. Peningkatan peran aktif masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk peduli terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

2. Kebijakan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana halnya di Indonesia pada umumnya semakin membesar akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu dan berlangsung sampai sekarang. Pada akhir tahun 2004 penduduk miskin di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 1.379.600 orang yang terdiri dari 262.903 berada di perkotaan dan 1.115.343 di pedesaan. Kemiskinan menjadi persoalan krusial dan perlu segera penanggulangan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2000-2004 diarahkan kepada :

2.1 Pengurangan Penduduk miskin.

Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin ini, maka kebiajakn yang diambil adalah :

1.1.1. Pembukaan sebanyak mungkin kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi kelompok miskin.

2.1.2. Peningkatan peranan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PMKK), sebagai institusi ekonomi yang diharapkan mampu membnatu percepatan pengurangan orang miskin.

2.1.3. Penyediaan fasilitas ekonomi bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

2.1.4. Perbaikan prasarana transportasi, pengurangan/penghapusan hambatan distribusi barang dan jasa.

2.2 Pengembangan Sumberdaya Lokal.

Pembangunan ekonomi Sumatera Selatan diarahkan bagi pengembangan sumberdaya lokal dengan 6 (enam) sektor unggulan yaitu sektor pertanian

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan & perikanan, pertambangan serta sektor pariwisata disamping sektor-sektor lainnya, dengan arah kebijakan masing-masing sebagai berikut :

2.2.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan.

Dilihat dari fluktuasi berbagai produkstivitas tanaman pangan, maka sejak beberapa tahun terkahir di Provinsi Sumatera Selatan terjadi penurunan kesuburan tanah akibat degradasi kualitas lingkungan di samping semakin berkurangnya lahan pertanian baru yang subur. Permasalahan lain di bidang pertanian tanaman pangan adalah kuantitas dan kontinyuitas ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan, alih fungsi lahan memberi dampak terjadinya pemanasan bumi. Di lain pihak beras masih merupakan fokus tumpuan banyak orang akan sumber kabohidrat, sehingga kebutuhan akan beras di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan penduduk. Berdasarkan kepada beberapa masalah tersebut di atas,maka kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan kepada :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan.
b. Memperluas spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi sumberdaya produksi dan konsumsi.
c. Pengembangan dan penerapan teknologi spesifik lokal
d. Peningkatan efisiensi sistem agribisnis dengan kandungan iptek dan berdaya saing.
e. Mendorong terwujudnya corporate farming.
f. Pengaturan distribusi pangan yang mengacu kepada mekanisme pasar.

g. Pembangunan pertanian yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan petani.

2.2.2. Sektor Peternakan.

Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjang oleh ketersediaan lahan dan pakan alami dan/atau potensi sumber pakan ternak adalah sangat potensial bagi pengembangan ternak, baik ternak besar maupun ternak kecik. Pada tahun 1996 pencanangan GERBANG SERBA BISA (Gerakan Pembangunan Sentra Bibit Ternak di Pedesaan) dilakukan di Propinsi ini. Oleh karenanya peningkatan peran Propinsi Sumatera Selatan untuk menjadi penghasil daging dan ternak nasional menjadi tujuan pembangunan peternakan. Untuk memenuhi maksud itu maka kebijakan pembangunan peternakan diarahkan kepada :

a. Memperluas spektrum pembangunan peternakan melalui diversifikasi teknologi sumberdaya produksi, konsumsi dan pemasaran.
b. Mengembangkan potensi lokal dan menerapkan teknologi spesifik lokasi.
c. Memberdayakan keunggulan komperatif komoditas dan wilayah.
d. Membangun peternakan dengan orientasi peningkatan pendapatan peternak.

2.2.3. Sektor Perkebunan.

Sektor perkebunan pada kenyataan adalah salah satu sektor yang menjadi penyelamat keterpurukkan perekonomian Indonesia akibat krisis. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong

perkembangan sektor ini. Hamparan perkebunan berbagai jenis komoditi di Sumatera Selatan seperti karet, kelapa sawit, kopi, sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang notabene produktivitasnya masih rendah dibandingkan dengan produkstivitas Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) ataupun milik BUMN. Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan pembangunan bidang perkebunan diarahkan kepada :

a. Perwujudan perkebunan rakyat yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi, produkstivitas dan keberlanjutan.
b. Mengoptimalkan sumberdaya perkebunan, baik fungsi ekonomi, sosil dan ekologi.
c. Peningkatan upaya rehabilitasi kebun dan lahan kritis.
d. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan terutama menuju daerah-daerah sentra pengembangan produksi perkebunan.
e. Pengurangan kesenjangan antara perkebunan besar dan masyarakat sekitar.
f. Peningkatan mutu bahan olahan produksi perkebunan di tingkat petani menuju Standar Nasional Indoensia.

2.2.4. Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pemanfaatan potensi perikanan dan usaha kelautan non hayati adalah hal yang perlu digali secara serius sebagai sumber pendapatan baru dan penerimaan devisa. Topografi Sumatear Selatan sebagian besar berawa dan garis pantai yang relatif panjang, adalah asset di bidang pengembangan perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan air

tawar yang selama ini belum diberdayakan secara optimal. Ekspor haisl perikanan Sumatera Selatan berupa udang beku, cumi-cumi, kura-kura, ikan kerapu, kepiting dan lainnya mencapai 144.982,65 ton pada tahun 2004 dengan nilai Rp.1.601.236.453.130,- dan angka itu sangat mungkin ditingkatkan lebih tinggi lagi. Oleh karenanya kebijakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan pada tahun 2004 diarahkan kepada :

a. Peningkatan produksi perikanan dan jasa kelautan.
b. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara memberdayakan masyarakat setempat.
c. Peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelautan dan perikanan.
d. Peningkatan pengawasan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

2.2.5. Sektor Pertambangan, Galian dan Sumberdaya Listrik

Peranan sektor tambang, galian dan sumberdaya listrik dalam perekonomian Sumatera Selatan relatif cukup besar. Kegiatan sektor pertambangan dan energi lebih dititik beratkan pada kegiatan penelitian dan inventarisasi bahan-bahan galian/pertambangan. Disamping dalam pengembangan eksploitasi akan terus dilakukan melalui kontrak karya maupun kontrak bagi hasil dengan para investor asing. Produksi hasil tambang yang vital dan strategis Sumatera Selatan Tahun 2004 yaitu :

Minyak Bumi 17.432.974 BBLS, Gas Bumi 9.566 MMSCF, Batubara 9.514.443 ton.

Dalam kegiatan operasional sumberdaya listrik, perusahaan listrik Negara PLN Wilayah IV Sumatera Selatan menggunakan tiga jenis tenaga listrik yaitu tenaga diesel, tenaga uap dan tenaga gas. Seluruh kabupaten/kota Sumatera Selatan menggunakan diesel sebagai pembangkit tenaga listrik, sementara perusahaan listrik tenaga uap (PLTU) hanya digunakan di kota Palembang dan Muara Enim. Jumlah pelanggan PLN di Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir (2000-2004) umumnya didominasi oleh rumah tangga mencapai 97,87 persen dari total pelanggan 640.163 pelanggan, sedangkan 0,05 persen dari total tersebut adalah pelanggan dari sektor industri (Sumsel Dalam Angka 2004). Guna mengoptimalkan peran sektor pertambangan, galian dan sumberdaya listrik terhadap pembangunan Sumatera Selatan, maka kebijakan pembangunan sektor ini diarahkan kepada :

a. Peningkatan kualitas kegiatan pertambangan sesuai dengan standar etika yang berlaku.
b. Meningkatkan kinerja SDM pertambangan dan listrik.
c. Menjamin tersedianya bahan baku sektor industri dan konstruksi.
d. Peningkatan kualitas rekayasa mineral.
e. Peningkatan kontribusi penerimaan daerah dari sektor pertambangan, galian dan listrik.
f. Peningkatan upaya diversifikasi, intensifikasi dan konversi energi.
g. Peningkatan efisiensi, produktivitas dan value added.

h. Pelaksanaan inventarisasi sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah, geologi, geologi teknik, geologi lingkungan dalam rangka mendukung tata ruang dan pembangunan.

2.2.6. Sektor Pariwisata.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi daya tarik wisata yang beraneka ragam. Sejak tahun 1991 Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata yang ke 17, dimana secara keseluruhan Sumatera Selatan dibagi dalam 4 Wlayah Pengembangan tujuan Pariwisata (WPP). Akan tetapi sejak Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi sendiri, maka praktis wilayah pengembangan wisata menjadi 3 wilayah yaitu masing-masing wilayah I terdiri dari Palembang, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu dan Muara Enim. Setiap wilayah pengembangan pariwisata memiliki objek dan daya tarik wisata unggulan. Palembang dan sekitarnya termasuk WPP I denga objek dan daya tarik wisata unggulannya adalah wisata budaya, kerajinan tangan dan sungai Musi. WPP II unggulannya adalah alam pegunungan, perkebunan the, gua Napacilin, dan danau raya. Sedangkan WPP III objek dan daya tarik wisatanya antara lain terdiri dari daya tarik alam, gua puteri, danau ranau, air terjun dan air panas. Kondisi kepariwisataan di Wilayah Sumatera Selatan sejak tahun 2004 sampai sekarang mengalami kenaikan dalam jumlah wisata yang datang, utamanya wisatawan asing. Bila tahun sebelum tahun 2003 jumlah wisatawan manca negara yang datang ke Sumatera Selatan mencapai lebih dari 30.000 orang, maka pada tahun 1997 jumlahnya hanya sebanyak 14.430 orang, tahun 1998

sejumlah 14.634 orang kondisi kunjungan wisatawan asing ke Sumatera Selatan sejak tahun 1999 sampai dengan 2004 mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 1999 jumlah wisatawan yang berkunjung berjumlah 17.879 orang. Tahun 2003 berjumlah 21.273 orang sedangkan tahun 2004 berjumlah 17.192 orang. Menghadapi kondisi demikian maka, kebijakan pembangunan bidang pariwisata Sumatera Selatan diarahkan kepada :

a. Meningkatkan pembangunan objek dan daya tarik wisat unggulan pada setiap wilayah pengembangan pariwisata.
b. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kepariwisataan.
c. Peningkatan peran lembaga-lembaga usaha jasa kepariwisataan di Sumatera Selatan.
d. Pengembangan potensi nilai seni budaya masyarakat melalui peranan dan fungsi lembaga-lembaga adat.
e. Peningkatan promosi wisata.

2.2.7. Sektor Industri dan Perdagangan.

Sektor industri yang merupakan salah satu dari 4 (empat) sektor dominan sebagai tulang punggung perekonomian Sumatera Selatan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Sumatera Selatan pada tahun 1999 sebesar 20,40 % . pada tahun 2003 jumlah perusahaan besar dan sedang di Sumatera Selatan sebanyak 150 buah, sedangkan tahun 2004 jumlahnya menjadi 159 buah (meningkat 5,67 persen), dengan mempekerjakan 24.625 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja setiap perusahaan mencapai 155 orang dengan nilai produksi 8.363.966 juta rupiah, maka nilai rata-rata produksi per tenaga kerja sebesar 339,67 juta rupiah.

Konstribusi perdagangan anek komoditi pada umumnya dilakukan melalui beberapa pelabuhan muat dan bongkar yang cukup banyak terdapat di Sumatera Selatan baik melalui pelabuhan udara, sungai dan kereta api. Dalam tahun 2004 ini jumlah perusahaan yang wajib daftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan sebanyak 2.564 buah perusahaan yang terdiri dari 385 buah PT, 82 buah Koperasi, 687 buah CV, 1.414 buah PD. Neraca perdagangan tahun 2003 sebesar $ 711.276,2, sedangkan pada tahun 2004 sebesar $ 1.070.363,1 (meningkat 66,45 persen).

Komposisi ekspor Sumatera Selatan Tahun 2004 sebagian besar terdiri atas produk karet dan barang-barang dari karet dengan nilai $ 599.108.072 (51,93 persen), BBM dan bahan bakar lainnya dengan nilai $ 184.228.857 (15,82 persen). Tiga komoditi lainnya yang mempunyai persentase yang cukup signifikan terhadap total nilai ekspor adalah minyak dan lemak hewan atau nabati, kayu dan barang-barang kayu dan pupuk.

Usaha industri/perdagangan di Sumatera Selatan yang sebagian besar bertumpuh kepada sumberdaya lokal (penggunaan bahan baku lokal) pada dasarnya memiliki keunggulan komparatif dan relatif mempunyai daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Namun demikian beberapa kelemahan yang disinyalir masih melekat dalam postur industri di Sumatera Selatan, utamanya industri menengah dan kecil antara lain adalah penggunaan teknologi yang terbatas, belum seluruhnya

menerapkan manajemen profesional, teknologi proses yang masih lemah sehingga mutu produksi masih rendah dan sistem promosi yang masih lemah pula. Berdasarkan kondisi itu, maka kebijakan di bidang industri dan perdagangan diarahkan kepada :

a. memberikan prioritas pengembangan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumberdaya lokal dan keunggulan daerah yang berorientasi ekspor.
b. Pengembangan iklim usaha yang kompetitif dan sehat.
c. Melancarkan, menyederhanakan prosedur birokrasi yang berhubungan dengan pengembangan industri dan perdagangan.
d. Pengembangan sistem promosi dan informasi pasar haisl industri.
e. Pemberdayaan institusi pendukung mekanisme pasar barang dan jasa.
f. Penguatan dan pendalaman stuktur industri melalui dukungan aspek iptek, manajerial dan bisnis.
g. Mengoptimalkan bantuan pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat.

3. Kebijakan Pembangunan di Bidang Budaya

Budaya merupakan perwujudan rasa, cipta, karsa dan karya suatu kelompok masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang menjiwai semua sikap dan prilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suku yang jumlahnya cukup banyak yaitu lebih kurang 21 suku, sehingga memiliki keaneka-ragaman budaya yang perlu dipelihara, dikembangkan serta diselaraskan untuk memperkokoh jati diri masyarakat Sumatera Selatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam meningkatkan

pembangunannya di berbagai bidang kehidupan. Bahwa pembangunan budaya yang selama ini dijalankan belum seluruhnya menghilangkan paham-paham kedaerahan yang sempit, sikap feodal dan ekslusif serta individualistik. Di bidang peninggalan sejarah yang jumlahnya cukup banyak aset budaya Sumatera Selatan yang belum seluruhnya disiapkan dan dimanfaatkan sebagai aset budaya lestari serta berfungsi sebagai kekayaan budaya yang layak dipromosikan. Demikian juga di bidang kesenian sebagai salah satu aspek budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sumatera Selatan, belum seluruhnya mampu digali dan dilestarikan oleh karena itu kebijakan pembangunan di bidang budaya diarahkan kepada :

3.1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya masyarakat Sumatera Selatan agar menjadi bagian dari budaya nasional yang berperan positif terhadap pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

3.2. Menumbuhkan kreativitas dan apresiasi seni budaya di kalangan muda Sumatera Selatan.

3.3. Menempatkan, mempromosikan seni budaya masyarakat Sumatera Selatan dalam pengembangan pariwisata daerah.

BAB III
ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN EVALUASI KEBIJAKAN

I. ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP

1. BANJIR

Secara kualitatif masalah banjir dan kekeringan terjadi akibat kesenjangan ataupun tidak menentunya waktu antara musim hujan dan musim kemarau di Sumatera Selatan. Distribusi hujan yang tidak merata sepanjang tahun cenderung terakumulasi pada waktu jumlah curah hujan yang tertinggi antara Januari sampai April 2004, terjadinya alih lahan dari sawah/hutan/perkebunan ke lahan berpenutup permanen seperti perumahan, industri, jalan perkantoran disamping bertambanya luas lahan kritis terutama dalam kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut telah mempercepat proses terjadinya banjir pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Letak geografi Provinsi Sumatera Selatan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai manfaatnya untuk kemakmuran masyarakat. Kekayaan sumberdaya alam dapat berupa minyak dan gas bumi, hasil hutan/kebun/laut dan perikanan/tambang telah banyak kontribusinya bagi pemasukan APBN dan APBD Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang pembangunan disegala sektor.

Kondisi dataran dan perairan Provinsi Sumatera Selatan yang strategis diatas, selain menguntungkan dari aspek sosial, budaya dan perekonomian tetapi juga menjadikan daerah tersebut rawan pangan, rawan banjir dan rawan kekeringan. Permasalahan banjir pada desa/kelurahan Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun terakhir sebanyak 244 kali.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan daerah kabupaten/kota yang terkena banjir 3 tahun terakhir (2002-2004) meliputi 11 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel terlampir;

Tabel.3.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan yang mengalami Banjir tiga tahun terakhir 2002-2004

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan dan Pedesaan		Jumlah
		Perkotaan	Pedesaan	
1	Ogan komering Ulu	-	22	22
2	Ogan komering Ilir	-	28	28
3	Muara Enim	11	62	66
4	Lahat	9	59	68
5	Musi Rawas	-	27	27
6	Musi Banyuasin	-	8	8
7	Banyuasin	-	19	19
8	Palembang	1	1	2
9	Prabumulih	1	1	2
10	Pagar Alam	1	1	2
11	Lubuk Linggau	-	-	-
Jumlah		16	228	244

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan banjir di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Masih lemahnya mutu dalam penetapan tata ruang wilayah karena belum memperhatikan aspek rawan ekosistem, oleh karena luasnya lahan kritis 1.695.381 Ha dari luas kawasan hutan lindung 3.185.079 Ha (53%).

b. Tingginya curah hujan terutama pada bulan Januari-April 2004 antara 3.400 sampai dengan 4.600 mm, kondisi ini telah menunjukan priode musim antara penghujan dengan kemarau tidak stabil.

c. Pendangkalan dasar sungai (sedmentasi) akibat adanya proses alaam, penambangan disekitar sungai yang tidak terkendali, perilaku penduduk yang

membuang sampah ke sungai yang berdampak meningginya permukaan air sungai dan terhambatnya aliran air sungai.

d. Penebangan hutan yang tidak terkendali sehingga terjadi perubahan fungsi hutan dan lahan yang diakibatkan oleh pesatnya pembangunan pada sektor industri, kehutanan dan perkebunan serta kerusakan lahan untuk penduduk sehingga fungsi hutan sebagai resapan air hujan (catchmen area) terutama pada bagian hulu sungai.

Tabel 3.9 Luas Lahan Kritis per fungsi kawasan menurut kabupaten/kota

No	Kabupaten/ Kota	Fungsi				Jumlah (Ha)
		HL	HP	HPT	HSA	
1	Banyuasin	16.764,4	27.850,5	-	61.491.3	138.180,4
2	Lahat	28.014,7	11.442,2	834,3	46.903,3	87.194,5
3	L. Linggau	822,8	-	798,3	5.774,1	7.395,2
4	Muara Enim	13.840,4	39.759,0	6.084,1	1.015,3	60.698,7
5	MUBA	29,9	104.922,6	2.691,3	932,3	172.597,1
6	Musi Rawas	246,6	161.922,6	2.600,9	80.262,4	278.334,6
7	Ogan Ilir	-	-	-	-	
8	OKI	67.938,4	629.623,6	9.953,9	6.299,6	861.312,8
9	OKU	3.799,8	7.479,7	14.761,0	-	26.040,5
10	OKU Selatan	19.799,0	16.483,0	2.876,5	5.511,8	44.670,3
11	OKU Timur	-	7.226,8	-	-	7.226,8
12	Pagar Alam	11.554,6	-	-	-	11.554,6
13	Palembang	-	-	-	-	-
14	Prabumulih	-	-	175,5	-	175,5
Jumlah		162.810,6	1.006.187,5	40.775,8	208.190,1	1.695.381,3

Sumber : Balai Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan : HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HSA : Hutan Suaka Alam

e. Adanya luapan air kiriman dari daerah hulu laut selat Bangka Provinsi Bangka Belitung.

f. Belum memadainya jumlah/kreteria/ukuran drainase (khususnya perkotaan) yang tersedia, sehingga banyak terlihat air yang melimpah memenuhi badan jalan.

g. Masih kurangnya lokasi ruang terbuka hijau/penghijauan dalam bentuk hutan kota, taman kota, penghijuan/tanaman pelindung di sepanjang jalan perkotaan, halaman rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, industri dan sepandan sungai.

h. Masih perlu penambahan lokasi/tempat penampungan air (kantong air) seperti kanal dan danau.

Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan banjir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dapat menumbuh kembangkan minat masyarakat/kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan pembersihan parit-parit jalan sekitar rumah masing-masing.

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapedalda telah mengkordinasikan pelaksanaan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan memproritaskan sekitar lokasi daerah tangkapan air (Pagar Alam, Musi Rawas dan Muara Enim).

c. Pada Tahun 2004 lokasi pelaksanaan puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam dengan kegiatan penyerahan hadiah lomba lukis anak sekolah dasar, lombah kebersihan pasar, penghargaan kalpataru, penanaman tanaman hutan/langk pada lahan kritis dan penebaran bibit ikan yang dikonsumsi masyarakat setempat, serta menyerahkan bantuan kotak sampah kepada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang berlokasi di pinggiran/bantaran sungai Musi Palembang.

Tabel 3.10 Penerimaan Penghargaan Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 di Kota Pagar Alam

Lomba Lukis Siswa Sekolah Dasar

Nama Siswa	Kabupaten /Kota	Alamat	Jumlah Nilai	Pemenang
Debby Ferisa	Palembang	SDN 196 Jl. Ceksyeh Kebun Duku 24 Ilir Bukit Kecil Palembang	601	Pertama
Natasia	Prabumulih	SD YKPP 1 Jl. Teratai Komperta Prabumulih	557	Kedua
Sendy Inka Cassella	OKU	SDN 4 Jl. Pangeran Hajib II Sederajat 195 Baturaja	534	Ketiga

Lomba Kebesihan Pasar

Nama Pasar	Kabupaten /Kota	Alamat	Jumlah Nilai	Pemenang
UPTD Km.5	Palembang	Kec. Kemuning Palembang	108	Pertama
Pasar Lama	OKU	Kec. Baturaja Timur Baturaja	106	Kedua

Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan

N a m a	Kabupaten /Kota	Alamat	Skor yg diberikan	Skor Maksimal
Budi Suyanto	Prabumulih	Jl. Taman Murni 51 Rt.1 Kp.II Kel. Gunung Ibul Brt Kec. Prabumulih Timur	236	280

d. Pada pelaksanaan puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 di Kota Lubuk Linggau (Water Fang bantuan Zaman Belanda) dengan kegiatan penanaman tanaman pelindung, penebaran bibit ikan yang dikonsumsi masyarakat, penyerahan hadiah lomba lusi siswa sekolah dasar, kebersihan pasar, penghargaan kalpataru (perintis, pembina, penyelamat lingkungan).

Tabel 3.11 Penerimaan Penghargaan Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 di Kota Lubuk Linggau

Lomba Lukis Siswa Sekolah Dasar

Nama Siswa	Kabupaten /Kota	Alamat	Jumlah Nilai	Pemenang
Chyntia Tiara Putri	Palembang	SD YSP PUSRI 2 Palembang		Pertama
Iswandi Kurniawan	MURA	SD 1 Kab. MURA		Kedua
Rhaka Puteri Sanigia	L. Linggau	SDN II Lubuk Linggau		Ketiga
Indra Wijaya	Prabumulih	SDN 50 Prabumulih		Harapan I
Habi Noprizal	P. Alam	SDN 6 Pagar Alam		Harapan II
Risky Kurniawan	Lahat	SDN 12 Lahat		Harapan III

Lomba Kebesihan Pasar

Nama Pasar	Kabupaten /Kota	Alamat	Pemenang
Kebun Semai	Palembang	Jl. Mayor Salim	Pertama
Pasar Inpres	L. Lubuk	Jl. Sudirman	Kedua
Pasar Lama Baturaja	OKU	Jl. Akmal	Ketiga
B. Srikaton Tugumulyo	MURA	Jl. Sudirman	Harapan

Kalpataru

N a m a	Alamat	Skor yg diberikan	Skor Maksimal	Kategori
Sanderson, ST	Jl.Beringin Blok C 58 A Kel. Bandar Jaya Lahat	226	280	Pembina Lingkungan
Boimin	Jl. Sepakat Rt.2 Ds. Eka Marga Lubuk Linggau Selatan II	224	280	Perintis Lingkungan
Suryoto	Jl. R. Terawas Rt.1 Desa Suka Karya Bkl. Ulu Terawas Kab. Musi Rawas.	350	280	Penyelamat Lingkungan

Gambar 3.1 Penyerahan Hadiah Lomba dan Penghargaan Kalpataru oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 di Kota Lubuk Linggau

e. Untuk mengurangi penebangan liar (illegal logging) pada kawasan lindung dan melestarikan flora dan fauna yang sudah langkah, maka Biro Lingkungan

Hidup dilanjutkan ke Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan flora dan fauna Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pohon Duku dan Ikan Balida (sesuai SK Gubernur Sumatera Selatan No.783/SK/XI/Tahun 1990 tanggal 19 Oktober 1999), pengusulan dan penetapan identitas flora dan fauna kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan (sesuai surat Dirjen Bangda Depdagri No.660.1/1003/V/Bangda tanggal 8 Juni 2000).

Tabel 3.12 Penetapan identitas flora dan fauna provinsi, kabupaten/kota Sumatera Selatan Tahun 2005

No	Provinsi Kab/Kota	Flora	Fauna	Keterangan	
1	Sumsel	Pohon Duku	Ikan Belida	OK	OK
2	Palembang	Cempaka Telok	Ikan Betutu	OK	OK
3	MUBA	Kayu Bungur	Ikan Patin	OK	OK
4	MURA	Merawan Batu	Berang-Berang	Usul	Usul
5	OKI	Tembesu	Kerbau Pampangan	√	√
6	OKU	Durian Tembaga	Telegur Sigung	OK	Usul
7	Lahat	Bambang Lanang	Ikan Semah	OK	OK
8	Muara Enim	Kayu Tenam	Berang-berang Gunung	OK	Usul

Sumber : Surat Dirjen Bangda Depdagri No.660-1/1003/V/Bangda tgl 8 Juni 2000

OK : Usulan disetujui

√ : Belum bisa ditetapkan karena nama latin belum jelas

Usul : Usulan dari namasumber ditinjau dari berbagai aspek

f. Untuk penanggulangi bencana banjir khususnya dan bencana alam pada umumnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2004 dan 2005, instansi terkait pemerintah dalam melakukan upaha seperti Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Badan Kesbanglimas dan South Sumatera Forest Fire Management Project telah membentuk Tim Satuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan dan akan menyusun Rancangan

Peraturan Daerah tentang Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

g. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan melalui instansi tehnis telah melakukan pembuatan tanggul, pengerukan sungai, pembuatan danau, rehabilitasi kanal dan siring yang kurang berfungsi.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangka meminimalisasi timbulnya permasalahan banjir di Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya masih belum mencapai maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kendali dilapangan, diantaranya :

1. Letak geografis kabupaten/kota Sumatera Selatan sebagai daerah berada pada posisi rendah dari permukaan air laut.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, melindungi hutan konservasi yang berfungsi sebagai catchment area dikarenakan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam kehidupan.

3. Masih kurangnya keinginan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menata atau pengembangkan ruang terbuka hijau dan pembangunan bendungan untuk pengendalian banjir serta perbaikan drainase ataupun parit jalan.

4. Pola penyusunan tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota belum sepenuhnya mengacu kepada kerawanan ekosistem.

2. DEGRADASI KUALITAS EKOSISTEM PADA SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (LEMATANG, KOMERING, MUSI HILIR, MUSI HULU) DAN PENCEMARAN.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan penyimpan air hujan kemudian mengeluarkannya ke laut melalui sungai utama, dimana wilayah daratan tersbut dinamakan daerah tangkapan air (catchment area) yang merupakan suatu ekosistem.

Secara umum, wilayah DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Ketiga daerah tersebut sangat berhubungan erat ditinjau dari dampak yang lebih mendapat perioritas penanganan karena kerusakan kondisi fisik di daerah hulu akan menimbulkan dampak buruk bagi wilayah tengah dan hilir. Itulah sebabnya selalu dikatakan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumberdaya air merupakan bagian dari sumberdaya alam yang menentukan bagi kehidupan manusia, disamping itu juga dapat menimbulkan daya rusak yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup disekitarnya. Air sebagai sumberdaya terbaharui mengikuti siklus hidrologi dan mengalir dari hulu ke hilir tanpa mengenal batas administrasi, namun pemanfaatan dan kelestarian dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi serta politik wilayah yang dilalui aliran sungai tersebut.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya air, perubahan peruntukan lahan pada daerah hulu aliran sungai, yang tidak memperhatikan aspke lingkungan dapat meningkatkan limpasan air permukaan serta memperbesar debit puncak pada waktu musim hujan dan memperkecil aliran sungai pada musim kemarau. Hal tersebut mempercepat proses kerusakan sumberdaya air dan mengancam ketersediaan air yang berkelanjutan.

Terhadap pemanfaatan sungai oleh berbagai industri, transportasi dan kegiatan lainnya dengan tidak memperhatikan kaidah lingkungan, akan meyebabkan kualitas air sungai tersebut menjadi tercemar baik secara visual (warna) maupun kandungan unsur. Untuk maksud tersebut diperlukan pola pengelolaan sumberdaya air pada masing-masing wilayah sungai berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta trasnparansi akuntabilitas.

Kerangka pemikiran pengelolan DAS perlu melibatkan tiga dimensi pendekatan analisis (standard) sebagaimana dikemukakan Hufschmidt (dalam asdak, 2002), sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang proses dan mekanisme

pengelolan DAS. Ketiga dimensi pendekatan analisis pengelolaan DAS tersebut adalah :

a. Pengelolaan DAS sebagai proses yang melibatkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah tetapi saling memepengaruhi.

b. Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan pengelolaan dan sebagai alat implementasi program pengelolaan DAS melalui kelembagaan yang relavan dan terkait.

c. Pengelolaan DAS sebagai serial aktivitas yang masing-masing berkaitan dan memerlukan perangkat pengelolan yang spesifik.

Untuk tercapainya pembangunan DAS berkelanjutan, kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan harus diselaraskan. Dalam hal ini diperlukan penyatuan dua sisi pandang tersebt secara realitis melalui penyesuaian kegiatan pengelolaan DAS dan konservasi daerah hulu ke dalam kenyataan-kenyataan ekonomi dan sosial.

Sudah saatnya konsep pengelolan sungai yang selama ini banyak dilaksanakan di Indonesia yang tercermin antara lain dari proyek Kali Bersih (Prokasi) diubah secara drastis menjadi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pola “one river, one plan, one management”. Keberadaan suatu sungai tidak bisa dipisahkan dari wilayah tangkapan airnya dan kegiatan-kegiatan yang ada disekitar DAS tersebut.

Kebijakan pengelolaan DAS yang menyangkut sumberdaya airnya, haruslah didasarkan pada evaluasi daya dukung dan daya tampung dengan memperhitungkan semua perubahan penggunanya yang mencerminkan beberapa prinsip, yaitu :

1. Penggunaan air berdasarkan pengkajian kuantitas dan kualitas air.

2. Penggunaan air tidak boleh melampaui batas permasokan yang berkelanjutan.

3. Baku Mutu dan jatah air untuk penggunaan air yang berbeda-beda harus dibuat.

4. Banyaknya air irigasi harus dibatasi pada jumlah minimum yang diperlukan untuk melunturkan garam-garam dari tanah teririgasi.

5. Pengelolaan mutu dan tingkat pengambilan air tanah sedapat mungkin memperkecil kerusakan lingkungan.

6. Untuk mempertahankan fungsi water table, laju pengeluaran air tanah secara alami harus dijadikan dasar untuk memperhitungkan proses pemompaan yang diperbolehkan.

7. Pengendalian bahaya terhadap kesehatan harus dipertimbangkan dalam penghitungan debit air yang diperlukan untuk menunjang ekosistem di tempat lain dalam DAS yang sama.

8. Praktek-praktek yang menimbulkan dampak dan merugikan, maka mutu air harus dikendalikan supaya air yang tercemar tidak sampai menurunkan mutu air sungai.

9. Teknologi yang bersih harus diperioritaskan, dekimian pula antisipasi terhadap pencemaran yang akan terjadi dengan mencegah pembuangan Bahan Berbahaya Beracun sintetik yang efek jangka panjangnya tidak diketahui.

Daftar Peta 3.1 Peta Wilayah Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005

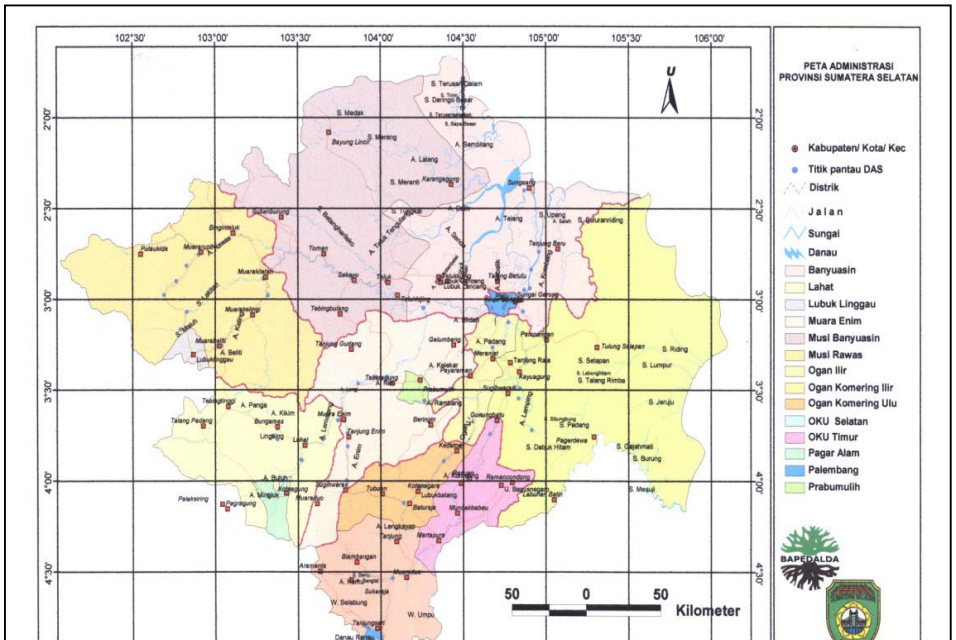

Tabel 3.13 Lokasi Pengambilan Sampel Air pada Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Selatan.

No	Sub DAS	Lokasi	Cakupan Wilayah
1	Lematang	- Tanjung Mulak Sungai Lematang - Pulau Pinang Sungai Lematang. - Muara Enim Sungai Enim - Jembatan Kebur Sungai Lematang. - Banuayu Sungai Lematang - Gunung Megang Sungai Lengi.	Hulu Tengah Hilir
2	Komering	- Desa Pusar OKU S. Ogan - Kota Batu S. Komering - Tanjung Raja OKI S. Ogan - Cempaka OKU Sungai Komering - Jembatan Kertapati Palembang Sungai Komering - Mariana Banyuasin Sungai Komering	Hulu Tengah Hilir
3	Musi Hulu	- Pulau Kerto Palembang Sungai Musi - Talang Kelapa Muara Enim Sungai Musi - Jembatan Ampera Plg S. Musi - Selat Borang S. Musi - Sungai Lakitan - Sungai Musi - Desa Upang S. Musi - Tanjung Buyut S. Musi	Hulu Tengah Hilir
4.	Musi Hilir	- Tanjung Aur S. Lingsing - Tanjung Raya S. Musi - Tebing Tinggi S. Musi - Muara Lakitan S. Lakitan - Terawas Hulu S. Lakitan - Sekayu S. Musi - Teluk Lubuk S. Batanghari Leko	Hulu Tengah Hilir

Sumber : Laporan Pengkajian Beofisik & Sosekbud Pusat Penelitian Management Air Dan Lahan UNSRI Tahun 2003

Di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) dengan masing-masing wilayah sungai yaitu :

a. Wilayah Sub DAS Ogan dan Komering

   Wilayah sub DAS Ogan dan Komering merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Musi (DAS Musi). Sub DAS Ogan memiliki daerah tangkapan air (catchment area) seluas 8.233 km^2 dengan panjang sungai 313 km sedangkan catchment area Sub DAS Komering seluas 9.908 km^2 dengan panjang sungai 328 km.

   Dengan catchment area yang sangat luas maka dalam pengelolaanya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai beban administrasi yang telah ditentukan. Pengawasan ataupun pengendalian dampak lingkungan harus dilakukan meliputi perambahan hutan, penebangan hutan tanpa izin, ladang atau kebun, tanah longsor erosi, banjir, pasang surut air sungai tiba-tiba, air sungai kering, keruh atau informasi atau kejadian yang dapat terjadi diluar kebiasaan.

   Secara geografi kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada $3^0 40^1$ lintang selatan sampai dengan $4^0 55^1$ lintang selatan dan 104^0 bujur timur sampai dengan 105^0 bujur timur dengan luas wilayah 13.661 km^2 berpenduduk 1.159.713 jiwa atau dengan kepadatan penduduk 84 jiwa / km^2.

   Geogerafi Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak diantara $104^0 2^1$ sampai dengan $106^0 00^1$ bujur timur dan $2^0 30^1$ sampai dengan $41^0 5^1$ lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 10 m diatas permukaan laut, luas 21.689.,57 km^2 dengan kepadatan penduduk 46 jiwa / km^2.

   Kota Palembang terletak diantara $2^0 52^1$ sampai dengan $3^0 5^1$ lintang selatan dan $104^0 37^1$ sampai dengan $104^0 52^1$ bujur timur yang memiliki luas wilayah 400, 61 km^2 berpenduduk 1.451.443 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.623 / km^2.

b. Wilayah Sub DAS Lematang

Pada wilayah Sub DAS Lematang mempunyai panjang 97,56 km dengan anak-anak sungai utama yaitu Sungai Enim, Selangis, Endikat, Lengi. Sungai Lematang melintas dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lahat dan Muara Enim serta Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih.

Penggunaan lahan dominan adalah areal pertanian dalam arti luas yaitu tanaman semusim dan tanaman perkebunan. Kegiatan lain yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek lingkungan uaitu penambangan batubara, minyak, pabrik pengelolaan bubur kertas dan usaha penambangan pasir dan batu kali yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Wilayah Sub DAS Musi Hulu

Keadaan wilayah DAS Musi memiliki luas 6.267.216 Ha dengan panjang sungai 928,81 km memiliki 11 Sub DAS yang tersebar di 8 kabupaten/kota dan 2 provinsi. Sub DAS Musi Hulu merupakan bagian dari DAS Musi yang memiliki panjang 51,7 km dan luas 467.170 Ha, mewakili 4 wilayah administratif yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Muara Enim.

Secara geogerafi Kabupaten Lahat merupakan bagian hulu pada $3^0 25^1$ lintang selatan sampai dengan $4^0 15^1$ lintas selatan dan $102^0 37^1$ bujur timur sampai dengan $103^0 45^1$ bujur timur, sedangkan Kabupaten Musi Rawas yang merupakan bagian tengah Sub DAS berada pada $2^0 0^1$ lintang selatan sampai dengan $3^0 40^1$ lintas selatan dan $102^0 00^1$ bujur timur sampai dengan $103^0 45^1$ bujur timur. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian hilir yang berada pada $1^0 3^1$ lintang selatan sampai dengan 4^0 lintas selatan dan 103^0 bujur timur sampai dengan 105^0 bujur timur.

Pemanfaatan Sub DAS Musi Hulu untuk saat ini sudah sangat beragam. Bagian hulu penggunaan DAS dodominasi dengan kegiatan pertanian tanaman perkebunan seperti kopi, lada, karet dan kemiri dengan tofografi berbukit. Bagi hulu terdiri dari batuan tutvulkan intermediet dan bahan induk yang terdiri dari

batuan pasir, lempung dan liat. Bagian tengah topografi relatif datar dimungkinkan masyarakat melakukan budidaya tanaman perkebunan dan pertanian. Untuk bagian hilir tofografi relatif datar dan didominasi rawa sehingga pemanfaatan untuk pertanian tanaman pangan dan pemukiman terlihat sangat dominan.

d. Wilayah Sub DAS Musi Hilir

Sub DAS Musi Hilir secara administrasi termasuk wilayah kota palembang dan Kabupaten Banyuasin. Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi kualitas air dari wilayah tersebut diambil 3 titik pengamatan intensif yang mewakili bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir Sub DAS Musi Hilir.

Secara geografi Sub DAS Musi Hilir berada pada $1,3^0$ lintang selatan sampai dengan $4,15^0$ lintas selatan dan $103,40^0$ bujur timur sampai dengan $106,00^0$ bujur timur dengan panjang 174,24 km. keadaan tofografi dataran rendah bergelombang tapi sebagian luas lahan rawa dan dataran bergelombang tanpa rawa. Keadaan geologi terbentuk dari bahan induk endapan pasir, lumpur, endapan intermedier dan sedimen masam. Sebagian besar wilayah Sub DAS Musi Hilir terkena dampak pasang surat air laut.

Faktor penyebab terjadinya degradesi kualitas ekosistem dan pencemaran pada Daerah Aliran Sungai Musi dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Permasalahan pemanfaatan tata ruang wilayah yang meliputi :
   - Tata ruang yang kuran mendukung terhadap pelstarian sumberdaya air dan kawasan lindung atau konservasi.
   - Perubahan kebijakan akibat otonomi daerah, sehingga penanganan pengelolaan sungai dilakukan hanya secara parsial sehingga terjadi konflik kepentingan.

2. Permasalahan Fisik SDA pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi :
   - Sedimentasi yang harus berlangsung akibat transport karena pengaruh cathment area yang kotor, sehingga daya tampung sungai sudah tidak cukup untuk menampung debit air yang ada.

- Terjadinya banjir hampir setiap tahun dengan cakupan yang terkena banjir semakin luas dengan intensitas yang semakin tinggi.

- Terjadinya degradasi kualitas air akibat banyaknya industri/kegiatan yang membuang limbah ke sungai dan penambangan tanpa izin galian C sehingga kualitas air sungai menjadi terganggu.

3. Terjadinya konflik kepentingan yang berbeda pada bagian hlu, tengah dan hilir sungai.

4. Permasalahan Sosial, Ekonomi dan Budaya meliputi :
   - Pertambahan penduduk.
   - Penebangan hutan (illegal logging)
   - Sungai dipakai untuk berbagai kepentingan (transportasi, pertanian, dll) sehingga sering berbenturan kepentingan.
   - Kebiasaan masyarakat dalam mendirikan rumah dibataran-bataran sungai.

5. Masih lemahnya permasalahan kelembagaan dalam mencegah, menanggulangi terjadinya degradasi kualitas DAS dan Pencemaran.
   - Lembaga Pengelola.
   - Koordinasi antar Dinas/Lembaga terkait.
   - Peran Serta Masyarakat.

6. Permasalahan kelestarian keanekaragaman hayati dengan terjadi pencemaran yang sangat berat sehingga kelestarian keanekaragaman hayati sangat terancam.

7. Kurangnya peran serta masyarakat di sepanjang DAS dalam berpartisipasi menjaga lingkungan sungai dengan perilaku membuang sampah ke badan air sungai.

8. Masih lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan limbah cair dari kegiatan usaha yang berada di sepanjang DAS, dengan mengacu kepada

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Tabel 3.14 Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

NO	Sumber Cemar	Lokasi	Tindak Lanjut
1.	Debu Pabrik PT. Semen Baturaja	Desa Air Gading Kec. Baturaja Barat	- Perbaikan alat penangkap debu - Penanaman vegetasi
2.	Limbah Cair Pabrik Caltex PT. Swasti Parama Mulyas	S. Selingsing Kec. Rambang Kapak Tengah.	- Penyempurnaan proses IPAL dan alat ukur debit - Surat Bapedalda ke perusahaan. -
3.	Pipa Minyak Sea Union Energy Ltd Jalur BEL.007 BEL 009	Muara Enim	Peninjauan lap. Bupati, Kapolres, Dandim Muara Enim Pertaminah DOH, ASDEP IV KLH dengan Hasil : - Pembersihan tumpahan minyak - Ganti rugi kpd masyarakat - Surat Bapedalda ke perusahaan.
4.	Pipa transmisi minyak Conoco Phillips Bocor	Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang	- Pembersihan minyak - Perbaikan pipa bocor
5.	Limbah pabrik PT. SAP	Desa Prajen Kec. Banyuasin I	- Penyempurnaan bak IPAL - Antisipasi debu bungkil sawit - Penanaman pohon pelindung

6.	Limbah Domistik PT. Saripati Abadi	Mes Karyawan PT. Saripati Abadi Kec. Betung	- Sumber pencemaran belum jelas. - Ganti rugi belum dilakukan
7	Eks Tambang Mas PT. BTM	S. Lasun dan S. Tiku Kab. Musi Rawas	- Tidak terbukit pencemar-an unsur Hg

8	Sumur minyak Pertamina DOH Sumbagsel terjadi Blow Out	Desa Betun Kec. Muara Enim	- Penanggulangan telah dilakukan - Ganti rugi belum teralisasi.
9	Limbah minyak PT. Retco Prima Energy	Ds. Tj. Kemala Kab. M. Enim	- Masih ada sisa minyak - Perbaikan gorong-gorong belum optimal.
10	Pabrik Crumb Rubber PT. Lingga Jaya	Ds. Lingga Kab. Muara Enim	- Pengenceran air limbah - Masih ada buangan siluman
11	Limbah minyak sumur 1163 Tlj 260/123/141 SP VII Pertamina DOH Sumbasel	Desa Sialingan, Desa L. Kelam Kab. M. Enim	- Sumber pencemaran belum jelas - Ganti rugi belum final dilakukan. - Surat Bapedalda ke perusahaan

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004.

Gambar 3.2 Pipa Penyaluran Minyak Mentah PT. Medco E & P Indonesia Pecah di Desa Sungai Ibul Kecamatan Pendopo Kebupaten Muara Enim pada Bulan April 2005.

Gambar 3.3 Semburan Blow Out Sumur Betun I Pertamina DOH Sumatera Selatan Bagian Selatan Desa Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim pada Bulan Juli 2005.

Gambar 3.4 Melubernya CPO di Dermaga Pengisian CPO PT. Sinar Alam Permai Kelurahan I Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada Bulan Mei 2005.

Adapun dampak terhadap kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya degradasi kualitas ekosistem DAS dan Pencemaran di Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Berubahnya bentuk topografi dan Pola DAS.
b. Berubahnya terhadap unsur mineral tanah, serta terganggunya kestabilan keberadaan flora dan fauna,
c. Berkurangnya luas cathment area akibat banyak kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan pada daerah konservasi.
d. Terjadinya penurunan kualitas air dari sungai-sungai yang ada di wilayah DAS akibat buangan limbah dan kecelakaan kapal.
e. Berubahnya kontur kedalaman dasar sungai, akibat pendangkalan terutama pada bagian hilir sungai.
f. Berkurangnya keanekaragaman biota perairan akibat tingginya tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh buangan limbah industri dan limbah domestik.
g. Timbulnya gangguan kesehatan masnusia, akibat rendahnya kualitas air sungai, antara lain penyakit diare, kulit dan lain-lain.
h. Rusaknya bantaran sungai akibat gelombang ombak kapal/speed boat dan banjir tahunan.
i. Meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM) akibat menurunya kualitas dan tingginya tingkat kekeruhan air sungai sebagai bahan baku air bersih.

Upaya pencegahan dan penanggulangan (response) degradasi kualitas ekosistem Sub DAS (Lematang, Ogan, Koering, Musi Hulu dan Musi Hilir) dan Pencemaran, antara lain sebagai berikut :

a. menetapkan secara menyeluruh Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada kawasan Daerah Aliran Sungai baik bersifat lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi (nasional) sehingga sesuai dengan peruntukkannya.

b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan DAS melalui kegiatan reboisasi terutama pada daerah hulu dan daerah tengah DAS, dimana pada daerah ini sangat banyak kegiatan sehingga memberikan tekanan terhadap kualitas ekosistem DAS.

c. Melakukan sosialisasi kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan pada daerah DAS terhadap stakeholder terutama pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat yang berada dalam kawasan DAS yang dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan melalui APBD Tahun 2004.

d. Melaksanakan pengambilan sampel pada 4 Sub DAS (Lematang, Ogan, Komering, Musi Hulu dan Musi Hilir) pada titik-titik yang telah disepakati guna mengetahui tingkat kualitas air sungai.

e. Menetapan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 yaitu :

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu air Sungai.

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Ambient dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair (MBLC) bagi kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara.

f. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegaiatan industri yang berada disekitar DAS Musi dengan mengacu kepada dokumen ANDAL, RKL-

RPL dan atau UKL-UPL perusahaan yang bersangkutan melalui beberapa kegiatan yang didukung dana APBD TA. 2004 diantaranya :

- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- Pembinaan dan pengendalian pencemaran air berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara.
- Penilaian Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER) Tahun 2004 sebanyak 45 perusahaan.
- Pemeriksaan sampel air, tanah, udara hasil pemantauan maupun kontrak perusahaan dengan laboratorium lingkungan Pemerintah Provinsi.

Tabel.3.15 Penetapan lokasi pemantauan kualitas udara pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

NO	Kabupaten/ Kota	Lokasi Sampling	Keterangan
1	Palembang	- Simpang 4 Jl. Kapten A. Rivai. - Simp. 4 PHDM Pusri - Simp. 4 Pasar Lemabang - Simp. 4 Jakabaring - Air Mancur (M. Agung) - Simp. Toko. IP - Simp. 4 RS Charitas - Simp. 4 POLDA - Simp. 4 Rajawali - Simp. 4 Tanjung Api-api - Simp. 3 Bandara - Simp. 3 Jl. Sungki Kertapati - Simp. Jembatan Musi Dua	* Berdasarkan Baku Mutu - PP 41 Thn 99 - Kep. MENLH 48-50 Tahun 96 * 13 Parameter - ttk Koordinat - Tgl Pengambil-an sampel - kecepatan Angin - Arah Air - So2 - No2 - CO - NH2 - TSP - Kebisingan - Suhu - Humudity
2	Ogan Ilir	- Simp. Prameswara	
3	OKI	- Simp. 4 Jl. Kayu Agung - Simp. 4 Dinas Kesehatan - Shoping Center Jl. M. Saleh - Perunas Lestari Kec. Sukadana - Kelurahan Kedaton - Tugu Simp. 4	
4	M. Enim	- Simp. 4 Kantor Pos	

		- Jl. Raya M.Enim-Tj. Enim PT. Lingga Jaya - Simp. 3 Kota Pendopo - Simp. 4 PT. Telkom Tj. Enim	
5	MUBA	- Pasar Perjuangan Sekayu - Pangkal Jembatan Musi Sekayu - Pasar Sungai Lilin Jl. Raya Sekayu-Jambi - Jl. Raya Sekayu-Lubuk Linggau PT. Kirana - Bundaran Kota Sekayu	
6.	Lahat	- Pasar Lama Jl. Mayor Ruslan - Diknas Lahat Jl. Kol. H. Burlian - Jl. Raya Lahat-M. Enim Merapi - Simp. 4 BRI - Perumnas Bandar Agung	
7	MURA	- Simp. 4 Yossudarso - Depan Kantor Bupati MURA - Muara Beliti	
8	L.Linggau	- Simp. Hotel Ridan - Taman Makam Pahlawan - Simp. Masjid Raya - Jl. Dempo Hitam - Depan Polres Lubuk Linggau - Depan Kantor KPP	
9	Banyuasin	- Simp. 3 Betung - Km15 Sukajadi - Km.13 alang-alang lebar - Km.11 alang-alang lebar	
10	OKU	- Pasar Lama jembatan Belanda - Ds. Talang Jawa - Pasar Baru Simp. Terminal - Perumahan Karyawan Simp. 3 Gajah - Rumah sakit Antonio Baturaja	

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel.3.16 Daftar Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER) Tahun 2004 Provinsi Sumatera Selatan

No	Peringkat	Nama Perusahaan	Unit Usaha
1	Hijau	PT. Tanjung Enim Lestari	Industri Pulp
2	Biru	- PT. Bukit Asam - PT. Sawit Mas Sejahtera - PT. Indofoor Sukses Makmur - PT. PN. VII PPKR Baturaja - PT. Dunia Kimia - PT. PN VII PG. Cinta Manis - PT. Remco - PT. PN. VII PPKS BETA - PT. Baja Baru - PT. Mitra Ogan - PT. PN. VII PPKR Beringin - PT. Gajah Ruku - PT. PN VII PPKS S. lengi - PT. PD Hoktong - PT. Minangga Ogan - PT. PN. VII PPKR MULA - PT. Muara Kelingi 1 - PT. Muara Kelingi 2 - PT. Panca Samudra - PT. Aneka Bumi Pratama - PT. Sunan Rubber - PT. Lestari Magris - PT. Sinar Alam Permai - PT. Laura Indo - PT. Tania Selatan - PT. Pupuk Sriwijaya	- Industri Tambang - Industri Kelapa Sawit - Industri Mie Instan - Industri Crumb Rubber - Industri Asam Sulfat - Industri gula - Industri Crumb Rubber - Industri Kelapa Sawit - Industri Crumb Rubber - Industri Kelapa Sawit - Industri Crumb Rubber - Industri Crumb Rubber - Industri Kelapa Sawit - Industri Crumb Rubber - Industri Kelapa Sawit - Industri Lateks - Industri Crumb Rubber - Industri Crumb Rubber - Industri Crumb Rubber - Industri Crumb Rubber - Industri Crumb Rubber - Industi Cold Storage - Industri M. Goreng - Industi Cold Storage - Industri Kelapa Sawit - Industri Pupuk
3	Merah	- PT. Semen Baturaja - PT. Pertamina UP III - PT. Pertamina DOH - PT. PLN Sektor Bukit Asam - PT. Tunas Baru Lampung - PT. Lonsum Belani Elok - PT. Hindoli - PT. Gutrie Peconina - PT. Pilona TAC Tj. Lontar	- Industri Semen - Industri Kilang BBM - Industri Eks. MB - Industri Pembangkit TL - Industri M. Goreng - Industri Kelapa Sawit - Industri Kelapa Sawit - Industri Kelapa Sawit - Industri Eks. MB

		- PT. PN VII PPKS TASA - PT. PN VII PPKR Tebenan - PT. Musi Banyuasin Indah - PT. Bina Sain Cemerlang	- Industri Kelapa Sawit - Industri Kelapa Sawit - Industri Kelapa Sawit - Industri Kelapa Sawit

		- PT. Melania - PT. Swasti Prama Mulya - PT. Interbis Sejahtera - PT. Langga Jaya - PT. Eka Jaya	- Industri Lateks - Industri Lateks - Industri Biscuit - Industri Crumb Rubber - Industri Kelapa Sawit

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan

g. Terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang terpadu dengan areal perkebunan, diwajibkan melakukan dan menerapkan prorgam land aplikasi terhadap seluruh limbah cair yang dihasilkan.

h. Menumbuh kembangkan program wisata air di daerah pembinaan perkotaan yang berada disepanjang sungai Musi Palembang.

i. Melakukan inventarisasi terhadap kegiatan usaha/perusahaan yang berpotensi mencemari maupun merusakan ekosistem lingkungan didalam wilayah Daerah Aliran Sungai Musi.

j. Menangani permasalahan/kasus lingkungan yang terjadi baik oleh masyarakat, perusahaan industri ataupun lembaga/instansi pemerintah.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangka meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada disepanjang DAS Musi (Sub DAS Lematang, Ogan, Komering, Musi Hulu dan Musi Hilir), hasilnya masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dilapangan seperti :

a. Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai acuan, arahan untuk mengambil kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

b. Masih rendahnya keinginan perusahaan menjadikan dokumen ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL sebagai acuan dalam pengelolan lingkungan terhadap proses kegiatan yang dilakukan.

c. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menentukan wilayah DAS Musi guna memantau kinerja pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan yang berada pada 4 wilayah Sub DAS.

d. Belum adanya kejelasan tentang keserasian penataan ruang disekitar kawasan DAS, kawasan Hutan Lindung yang menyangkut kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

e. Belum tersedianya rencana pengelolaan DAS secara terpadu yang bersifat lintas wilayah sebagai acuan daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya IUCN-UNEP-WWF menyarankan tindakan-tindakan yang diperioritaskan dalam menggunakan air yang berkelanjutan memerlukan :

1. Informasi yang lebih baik.
2. Kesadaran yang lebih baik tentang bagaimana cara kerja siklus air, efek-efek TGL pada siklus air, tentang pentingnya lahan basah dan ekosistem lainnya serta tentang bagaimana menggunakan air dan sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan pelatihan yang lebih baik dalam masalah-masalah ini.
3. Pengelolaan pembagian air harus menjamin efisiensi dan keadilan bagi semua pengguna air.
4. Pengelolaan terpadu atas pengguna air dan lahan.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan air sungai dan air tawar.
6. Peningkatan kesediaan masyarakat untuk menggunakan sumberdaya air secara berkelanjutan.
7. Pelestarian keragaman species dan stok genetik.

Bertitik tolak dari kebijakan dan anjuran tersebut, konsep pengelolaan DAS yang selama ini dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang bersifat sektoral dan

terpisah-pisah (fragmentatif), diubah dengan menerapkan pendekatan ekosistem yang bersifat holistik, terpadu (integratif) dan beraturan (sistemik) dan menggunakan DAS sebagai satuan pengelolaan.

3. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian rutin yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1997. fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat kebutuhan lahan, baik legal maupun illegal cukup tinggi. Bersamaan dengan datangnya musim kamarau, maka metoda pembukaan dan pemersihan lahan yang paling murah adalah dengan membakar. Namun akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ini seringkali diabaikan. Padahal kejadian ini telah memberikan dampak yang sanggat signifikan terhadap tingkat pencemaran udara.

Hutan secara ekologis mempunyai fungsi dan manfaat yang cukup besar bagi keseimbangan ekosistem. Adapun fungsi dan manfaat dari hutan diantaranya adalah sebagai pengatur iklim mikro, produsen oksigen dan penyerap gas karbon dioksida, pengendalian polusi udara, pengatur tata air yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk lain dan sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati.

Sesuai dengan hasil pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2004 yang berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (RTRWP), luas dan kondisi kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2004 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Luas dan Kondisi Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Fungsi Hutan	Luas	Kritis
1	Hutan Lindung	568.609	162.810
2	Hutan Produksi Tetap	1.669.370	1.006.187

3	Hutan Produksi Terbatas	236.990	40.775
4	Konservasi Sumberdaya Wisata	711.778	208.190
5	Produksi yg dpt dikonversi	498.332	277.417
Jumlah		3.685.097	1.695.381

Sumber : 1. Balai Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah II Sumsel
2. Balai Pengelolaan DAS Musi Prov. Sumsel
3. Dinas Kehuatan Prov. Sumsel

Kerawanan hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan terhadap kebakaran sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan dalam usaha pertanian rakyat, usah perkebunan skala sedang dan besar serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya, seperti perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging). Kebiasaan melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara membakar yang tidak dikuti dengan upaya pengendalian apr, seperti pembuatan sekat bakar, pengaturan jadwal pembakaran dan tidak adanya pengawasan terhadap api sehingga menyebabkan api merembet secara tidak terkendali.

Berdasarkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2004 lebih kecil dibandingkan tahun 2000. hal ini dikarenakan musim kamarau tahun 2004 tidak berkepanjangan sehingga pada bulan Oktober 2004 telah masuk pada musim penghujan dan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Daftar Peta 3.2. Peta kawasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan

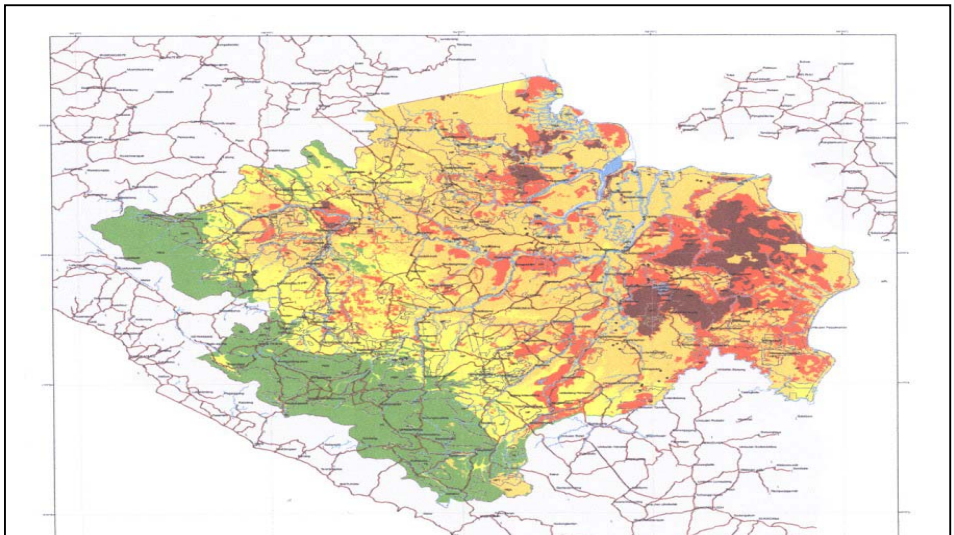

Berdasarkan daerah administratif, jumlah hotspot terbanyak untuk tahun 2005 terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 216 hotspot disusul Kabupaten Banyuasin 192 hotspot, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 167 hotspot, Kabupaten Musi Banyuasin 153 hotspot, Kabupaten Ogan Ilir 125 hotspot dan Kabupaten Musi Rawas 106 hotspot. Adapun rekapitulasi data jumlah hotspot perwilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan untuk 1997 sampai tahun 2005 dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 3.1 Kondisi Hotspot Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2005 (Sumber Dinas Kehutanan).

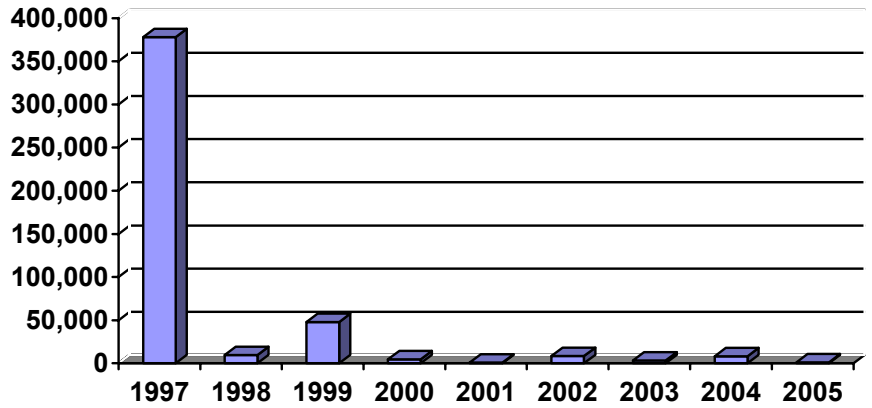

Sedangkan luas areal hutan dan lahan terbakar di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukan peningkatan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel.3.18 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2002

No	Tahun	Luas (Ha)
1	1999	455
2	2000	167

3	2001	305
4	2002	6.205

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan dari data hot spot bulanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 menunjukan bahwa data titik panas (hot spot) yang tertinggi pada Bulan Agustus sebanyak 550 hot spot disusul Bulan September sebanyak 322 hotspot untuk Bulan Juli sebanyak 96 hot spot dan Bulan Oktober sebanyak 93 hotspot.

Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak pada berbagai sektor baik kepada perekonomian, produksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dipicu oleh unsur kondisi alam dengan kesengajaan terutama pada musim kemarau, umumnya terjadi pada lahan bekas tebangan, lahan perkebunan, lahan masyarakat dan lahan gambut.

Adapun luas areal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun terakhir sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 seluas 7.132 Ha, sedangkan titik panas (hot spot) selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 dengan jumlah berpariasi yaitu pada tahun 2001 sebanyak 832 hot spot, tahun 2002 sebanyak 8.661 hot spot, tahun 2003 sebanyak 3.367 hot spot, tahun 2004 sebanyak 8.120 hot spot dan tahun 2005 sebanyak 1.134 hotspot (Oktober 2005).

Berdasarkan data dari tabel kondisi hot spot dari tahun 1997 sampai tahun 2005 jumlah yang sangat menonjol adalah pada tahun 1997 sebanyak 372.838 hotsport dikarenakan kemarau panjang, dan pada tahun 1999 terjadi penurunan dengan jumlah 47.988 hot spot, sedangkan luas areal yang terbakar dalam kurun waktu terakhir sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 terlihat data yang paling menonjol yaitu tahun 2001 dengan luas lahan yang terbakar 6.205 Ha.

Faktor penyebab (pressure) terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement).
b. Masih belum teranggarnya dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terprogram di Provinsi Sumatera Selatan.
c. Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemadaman dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
f. Masih rendahnya sistem informasi (peringatan dan informasi dini) kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
g. Masih kurangnya pengawasan di areal kegiatan perkebunan, pertanian terutama pada lahan gambut.
h. Masih kurangnya kesadaran pihak pengusaha dan masyarakat pada kegiatan perkebunan dan pertanian akan pentingnya kualitas lingkungan hidup dalam pembukaan areal *(land clearing)*.
i. Pola pikir pengusaha masih bersifat profit oriented sehingga dalam pelaksanaan penamanan hanya didasarkan untuk mencapai target sesuai *Rencana Kerja Tahunan* yang diperoleh, sehingga kurang memperhatikan program *Zero Burning* dalam pembukaan lahan.
j. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
k. Belum adanya alternatif penyiapan lahan lain yang relatif lebih murah dibanding dengan penyiapan lahan dengan cara membakar.
l. Organisasi Non Struktur Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) di tingkat Provinsi maupun Saklak Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota bersifat koordinatif belum bekerja secara maksimal dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Adapun dampak terhadap kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain sebagai berikut :

a. Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan.
b. Permasalahan kabut asap yang sampai mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran, yang sebaranya sampai ke negara tetangga (Malaysia, dan

Singapure). Sehingga muncul gugatan negara tetangga terhadap Indonesia akibat kabut asap yang terjadi.

c. Penyebaran penyakit Inpeksi saluaran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarakat

Tabel 3.19 Perkembangan penyakit saluran pernapasan bagian atas pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Penyakit Saluran Pernapasan	
		Infeksi Akut lain pada Saluran Pernapasan (org)	Penyakit lain pada Saluran Pernapasan (org)
1.	Palembang	180.150	42.566
2.	Muara Enim	65.307	10.279
3	Musi Rawas	16.499	6.088
4	Prabumulih	5.311	10.755
5	Pagar Alam	1.856	-
	Jumlah	269.123	69.688

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2004

d. Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran.
e. Kerugian negara secara finansial atas punahnya sumberdaya alam hayati dan biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
f. Terganggunya aktivitas pendidikan.
g. Terganggunya produksi pertanian akibat lemahnya intensitas matahari untuk aktivitas fotosintesa.
h. Terbentuknya sebaran lahan ktiris di daerah Provinsi Sumatera Selatan mengkonstribus terjadinya degradasi kualitas ekosistem lingkungan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area), pengikat tanah agar mengurangi/menghamat terjadi erosi dan habitat flasma nuftah.

Upaya pencegahan dan penanggulangan (response) kabakaran hutan dan lahan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Langkah Strategis

1) Penetapan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 280/KPTS/HUT/2005 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PPKLH) Provinsi Sumatera Selatan.
2) Mengadakan rapat koordinasi atau pertemuan antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Menteri Kehutanan.
3) Mengadakan rapat koordinasi Gubernu Sumatera Selatan dengan pimpinan perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan dalam rangka persiapan menghadapi musim kemarau.
4) Mendayagunakan organisasi Pusdalkarhutla mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang pada intinya membentuk regu-regu pemadam kebakaran *(regdamkar)* di tingkat desa.
5) Mengintensifkan kegiatan penyuluhan kebakaran hutan dan lahan.
6) Meningkatkan kemampuan SDM pemadam kebakaran, jumlah dana dan sarana prasarana.
7) Mengkoordinasikan instansi yang terkait dengan kegiatan penanggulangan kebakaran dari tingkat pusat sampai daerah.
8) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam rangka penyusunan Draft Standar Opersion Prodesur (SOP) atau Prosedur Tetap tentang Mobilisasi Sumberdaya Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
9) Mengadakan kegiatan simulasi kegiatan penanggulangan kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI dan Ogan Ilir.
10) Penuntutan secara hukum (yuridis) atas kebakaran huran dan lahan yang terjadi di areal perkebunan/kehutanan, terhadap beberapa perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran.

b. Langkah-langkah Rutin/Umum
   1) Preventif
      a) Pemasangan papan peringatan

         Mewajibkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan pemasangan papan peringatan di lokasi yang mudah terbakar, rawan kebakaran dengan bahasa yang informative, mudah dimengerti serta

dihidari menggunakan kata-kata yang sifatnya melarang atau mengancam

b) Penyuluhan

Mengadakan kegiatan penyuluhan dibeberapa kabupaten/kota bersama-sama dengan Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan maupun Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat agar tahu, mau dan mampu menjaga, memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup terutama dari gangguan kerusakan yang diakibatkan kebakaran hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan atau sarasehan, temu wicara, sekaligus penyebarluasan leaflet/booklet dan pemutaran film.

c) Pemantauan dan penyebarluasan data hotspot

Mencari dan mengolah data hotspot dari satelit NOAA berbagai sumber untuk disebarluaskan kepada Dinas terkait di kabupaten/kota, perusahaan perkebunan dan kehutanan untuk dilakukan pengecekan ke lapangan.

d) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara, sedangkan guna melindungi kesehatan masyarakat akibat dari pengaruh asp, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) membagikan masker kepada masyarakat secara gratis terutama pada daerah rawan kabut asap, yang diperoleh dari partisipasi pihak swasta.

2) Pengendalian

a) Mengikuti rapat koordinasi secara berkala di Sekretariat Pusdalkarhutla yang dikuti instansi terkait.

b) Penyebarluasan instruksi/pengumuman/himbauan/Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau.

c) Mengakfitkan posko siaga yang bertugas selama 24 jam penuh pada kondisi siaga 1.

d) Melakukan koordinasi dengan posko pada Satlakdalkarhutla di kabupaten/kota.
e) Sosialisasi terhadap sanksi bagi perusahaan perkebunan/kehutanan bilamana pada areal perusahaan tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam proses pembukaan areal (land clearing) yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 bab IX pasal 41.
f) Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dalam rangka melaporkan tingkat kerusakan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
g) Melakukan pendekatan dalam rangka usulan kegiatan rehabilitasi terhadap aeral eks kawasan hutan dan lahan yang terbakar melalui sumber dana DAK-DR melalui Program GNRL (Gerakan Nasional Reboisasi Lahan) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2005, yang sepenuh pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan Gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bertindak selaku pengawas pelaksana lapangan.

Tabel 3.20 Luas Kawasan Non Hutan yang dikonversi menjadi Hutan Menurut Fungsi Hutan Pada Kabupaten/Kota Tahun 1998-2005

No	Kabupaten	Fungsi Hutan					Jumlah
		HSA	HL	HPT	HPT	HPK	
1	MUBA				1.755		1.755
2	MURA	2.462	2.255				4.717
Jumlah		2.462	2.255		1.755		6.472

Tabel 3.21 Luas Kawasan Hutan yang dikonversi menjadi Non Hutan Menurut Fungsi Hutan Pada Kabupaten Tahun 1998-2005.

No	Kabupaten	Fungsi Hutan					Jumlah
		HSA	HL	HPT	HPT	HPK	
1	MURA	25.303				15.388	40.691
Jumlah		25.303				15.388	40.691

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan : HSA : Hutan Suaka Alam
HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HPT : Hutan Produksi Tetap
HPK : Hutan Produksi Konversi

3) Pemadaman
   a) Penyiapan perlengkapan pemadaman meliputi peralatan mekanis, semi mekanis, peralatan tangan, perlengkapan perseorangan dan peralatan perseorangan.
   b) Penyiapan Brigade pemadaman dengan tenaga inti polisi kehutanan.
   c) Persiapan mobilisasi sumber daya pemadaman seperti transportasi, logisteik dan pendanaan.
   d) Memobilisasi regu pemadam di sekitar hutan dan areal kerja HPH/HPHTI.
   e) Membentuk Brigade Pemadam Kebakaran di 4 Kabupaten yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI dan Ogan Ilir.

Terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, hasilnya masih belum sebagaimana diharapkan dan hal ini dikarenakan adanya kendala di lapangan, antara lain yaitu :

a. Belum jelasnya acuan alternatif program Zero Burning dalam pelaksanaan pembukaan lahan, dalam bentuk Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

b. Pola pembukaan areal masyarakat tani tempatan yang masih melakukan pembakaran sisa kayu/tebangan.

c. Masih terbatasnya ruang pengawasan di lapangan mengingat begitu luasnya dan berpencarnya lokasi pembukaan areal hutan yang dilakukuan oleh para pemegang HPH dan pengusaha perkebunan bila dibandingkan dengan

jumlah personal pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Belum adanya suatu keterpaduan keinginan (willingness) antar instansi teknis terkait dalam penegakan hokum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam proses kegiatan pembukaan areal (land clearing).

J. EVALUASI KEBIJAKAN

Permasalahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang begitu komplek dan beragam diperlukan penyelesaian yang bijaksana, dimana kegiatan-kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan akan tetapi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditekan/diminimalisasikan sedini mungkin melalui perangkat kebijakan daerah yang ada.

Disadari bahwa keberadaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berperan sebagai sumber pencemar dan sumber perusak terhadap komponen lingkungan hidup dan juga bila disimak isu-isu lingkungan yang terjadi selama tahun 2004 ini terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat disegala lapisan (masyarakat, pengusaha dan aparat), tidak berada pada satu koridor hukum yang telah diatur sehingga masing-masing kepentingan memiliki sasaran akhir (final terget) berbeda, belum lagi saling bersinggungan satu sama lain. Disamping itu masih terlihat kesenjangan pelaksanaan pembangunan di daerah Sumatera Selatan antara kabupaten/kota yang ada/kurang memiliki potensi sumberdaya alam strategis dan komersil, yang selanjutnya akan berpotensi sebagai pemicu timbulnya permasalahan sosial.

1. Umum

   Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat dampak kegiatan-kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan selama tahun 2004-2005 tersebut perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Porvinsi dan Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :

a. Dalam bidang ekonomi, hendaknya ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang subsidi silang antar daerah daerah kabupaten/kota sehingga pembangunan di Daerah Sumatera Selatan dapat terlaksana secara merata, menyeluruh dan berkesinambungan.

b. Untuk kegiatan dibidang pengelolaan sumberdaya alam hendaknya ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan proses pemanfaatannya di daerah yang mengacu kepada asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, guna menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan sekarang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

c. Guna mengantisipasi semakin memburuknya kualitas komponen lingkungan hidup akibat dampak kegiatan pembangunan/industri, hendaknya ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang :
   - Peran serta masyarakat/LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan berdasarkan dokumen AMDAL, UKL-UPL yang telah disetujui Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

   - Pengoptimalan, pemberlakuan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu lingkungan untuk limbah cair, udara dan padat.

d. Perlu adanya suatu PERDA yang mengatur daya dukung lingkungan kawasan perairan, DAS, tanah/lahan, kawasan hutan, kawasan perkotaan.

e. Guna untuk mengatisipasi bertambah luasnya lahan kritis akibat kebakaran hutan dan lahan diperlukan PERDA pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Penanggulangan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di daerah Sumatera Selatan

   Dalam rangka penanggulangan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2004-2005 ini masih dirasa perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil yaitu sebagai berikut :

   a. Permasalahan Banjir

1) Pemetaan lokasi kota/desa yang mengalami bencana banjir dan rawan banjir, sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengantisipasi terjadinya banjir.

2) Pengalokasian dana Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan bendungan pengendalian banjir (bagi perkotaan) dan perbaikan kualitas drainasi.

3) Membina kelompok masyarakat di daerah rawan banjir dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi/mengantisipasi terjadinya bencana banjir.

4) Melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi lahan (kritis) terutama di daerah-daerah rawan banjir.

b. Degradasi Kualitas Ekonomi DAS Musi (Sub DAS Lematang, Ogan, Komering, Musi Hulu dan Musi Hilir)

1) Penyusunan perencanaan terpadu pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (Lematang, Ogan, Komering, Musi Hulu dan dan Musi Hilir).

2) Penetapan baku mutu khusus peruntukkan sungai Komering dan Lematang.

3) Optimalisasi penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi usaha/kegiatan dan penerapan program Land Aplikasi bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada wilayah DAS.

4) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah DAS dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat.

5) Melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Pusat dalam rangka penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan DAS antar provinsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sub DAS Lematang, Ogan, Komering, Musi Hulu dan Musi Hilir.

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

1) Mengupayakan secara bertahap pengadaan peralatan dan mobilitas pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2) Dalam pembentukan kelembagaan khusus yang dapat bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, dapat menempatkan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai dan didukung dana, peralatan cukup dan kewenangan yang jelas di lapangan.

3) Perlu adanya PERDA yang mengatur Pola Pembukaan areal dengan membakar dan sanksi terhadap perusahaan dan masyarakat yang dikarenakan kegiatannya di lapangan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

4) Membina kelompok masyarakat disekitar hutan, Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBNS) dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dana lahan.

5) Melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
REKOMENDASI

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2004 – 2005. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat terlaksana sesuai sasaran yang diharapkan dengan mengacu kepada pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna penyempurnaan kebijakan tersebut maka pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2006 dapat direkomendasikan beberapa program prioritas pembangunan yaitu :

A. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

1. SASARAN

a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
b. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan secara seimbang pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
d. Meningkatnya APK jenjang SD sederajat menjadi 106,8%.
e. Meningkatnya APK jenjang SMP mencapai 78%.
f. MeningkatnyaAPK jenjang SMA sederajat mencapai 60%.
g. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
h. Meningkatnya cakupan pelayanan sarana dan prasarana pemukiman.
i. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
j. Meningkatnya cakupan prasarana jalan dan jembatan.
k. Meningkatnya pelestarian sumberdaya air, DAS dan rawa serta peman faatannya untuk penyediaan irigasi dan bahan baku air bersih.
l. Meningkatnya pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi secara terpadu inter dan antara kota.
m. Meningkatnya sarana dan prasarana dasar di daerah terisolir dan tertinggal.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Meremajakan dan menyiapkan KASIBA/LISIBA dalam upaya memacu tumbuhnya pusat – pusat pemeliharaan pendukung.
b. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa prasarana jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan aksebilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung.
c. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin kelancaran akses, mobilitas orang, barang dan jasa baik melalui darat, sungai, laut dan udara.
d. Membangun dan mengembangkan pengairan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengairan yang sudah ada.

3. PROGRAM

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, agama dan sosial.
b. Peningkatan jaringan transportasi.
c. Penyehatan lingkungan.
d. Pengembangan transportasi terpadu.
e. Peningkatan aksebilitas inter dan antar wilayah.
f. Pengembangan kawasan Tanjung Api-api.
g. Rehabilitasi pelestarian sumberdaya air.
h. Pengembangan daerah terisolasi, daerah tertinggal dan kawasan cepat tumbuh.

B. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. SASARAN

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan.
b. Meningkatnya akses masyarakat di daerah miskin dan sulit dijangkau untuk pelayanan pendidikan melalui media teknologi komunikasi dan bantuan beasiswa.
c. Menurunnya angka buta aksara.
d. Meningkatnya keterampilan warga putus sekolah dan pengangguran.
e. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita miskin.

f. Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
g. Menurunnya angka kesakitan TB Paru.
h. Menurunnya angka pengangguran.
i. Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
j. Meningkatnya kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan buruh.
k. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan lainnya.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan akses petani dan UKM terhadap sumber permodalan dan pasar.
b. Pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada petani dan kelompok usaha.
c. Pembinaan dengan pemberian stimulan berupa dana bergulir kepada petani dan kelompok usaha.
d. Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan melalui fasilitas penguatan lembaga dan organisasi barbasis masyarakat di perdesaan.
e. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang memiliki angka buta aksara tinggi dan wilayah perdesaan.
f. Peningkatan keterampilan kejuruan dan pengembangan model-model pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja.
g. Perkuatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi pusat kegiatan belajar masyarakat dan satuan pendidikan yang sejenis.
h. Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, masyarakat di wilayah perdesaan dan terpencil.
i. Pengembangan jaminan kesehatan bagi pendudukan miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Kelas III Rumah Sakit.
j. Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong usaha perluasan dan penciptaan lapangan kerja.
k. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja.
l. Peningkatan jaminan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja melalui hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

m. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. PROGRAM

a. Program perbaikan gzi dan kesehatan masyarakat.
b. Program pemberdayaan masyarakat desa.
c. Program peningkatan mutu dan perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan.
d. Program peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
e. Program pemerataan penyebaran penduduk.
f. Program pemberdayaan ekonomi rakyat perdesaan dan pinggiran.
g. Program pembinaan dan peningkatan kesejahteraan buruh serta masyarakat di daerah kumuh.
h. Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
i. Program peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tambang.
j. Program pembinaan, penanggulangan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial.

C. PENGEMBANGAN TUJUH BIDANG UNGGULAN

1. SASARAN

Sasaran pengembangan tujuh bidang unggulan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
b. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan melalui pendayagunaan lahan.
c. Pengembangan usaha agribisnis untuk peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
d. Peningkatan diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna.

e. Pembinaan penanganan pasca panen, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternnakan, perkebunan, perikanan dan ketuhanan.
f. Optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan rakyat serta pengembangan hutan kemasyarakatan.
g. Meningkatkan kerja sama antar daerah, regional dan internasional dengan mempromosikan produk-produk lokal melalui kegiatan pameran baik yang bertarif nasional maupun internasional.
h. Mengembangkan industri kecil dan kerajinan yang menggunakan produk andalan dan unggulan daerah.
i. Mendorong perdagangan antar kabupaten/kota melalui perwilayahan komoditas.
j. Mengutamakan barang jadi dan setengah jadi dalam perdagangan ekpor-impor.
k. Meningkatkan upaya perlindungan perdagangan produk lokal terhadap produk impor sejenis.
l. Meningkatkan kualitas dan fasilitas perdagangan.
m. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menambah daya tarik investor.
n. Meningkatkan promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri.
o. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif untuk penyediaan listrik di perdesaan (PLTS dan PLTMH).

3. PROGRAM

a. Program penguasaan teknologi tepat guna.
b. Program pengembangan dan pelestarian budidaya ikan lokal.
c. Program peningkatan produktivitas ternak.
d. Pengembangan bahan baku menjadi produk olahan.
e. Program pengembangan agropolitan.
f. Program pengembangan agroindustri.
g. Program pengembangan perwilayahan komoditi pertanian dan perkebunan.
h. Program pengambangan agrowisata.
i. Program pengambangan industri pariwisata daerah.
j. Program pengembangan produk seni dan budaya daerah.
k. Pengelolaan kelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

l. Program peningkatan industri kerajinan rakyat dan khas daerah.
m. Program rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya hutan.
n. Program pengembangan produk ramah lingkungan (’Eco Labelling’)
o. Program pengembangan kawasan sentra produksi, industri dan perdagangan.
p. Program peningkatan daya saing mutu dan kemasan produk.
q. Program peningaktan peran lembaga-lembaga perdagangan.
r. Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar.
s. Program peningkatan kerjsama antar daerah, regional dan internasional.

D. PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

1. SASARAN

Diarahkan untuk dapat menjamin ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan daerah sehingga dapat terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga yang terjangkau.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningaktan penganekaragaman pangan.
c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.

3. PROGRAM

a. Program perlindungan pangan daerah
b. Program peningkatan diverifikasi pangan
c. Program peningkatan litbang pangan

E. PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT

1. SASARAN

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
    - Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
    - Menurunnya angka kematian bayi.
    - Meningkatnya harapan hidup.
    - Meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat.

- Menurunnya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan perubahan pola hidup.

b. Menurunnya prevalensi gizi buruk.
c. Meningkatnya Angka partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan.
d. Menurunkan buta aksara Al-Qur'an.
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Perguruan Tinggi di daerah.
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi.
g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
h. Meningkatnya kualitas pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
i. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan pelayaan kesehatan dasar yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
c. Melindungi masyarakat dari penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
d. Melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari penggunaan NAPZA.
e. Peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
f. Peningaktan penyediaanm pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu.
g. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan Al-Qur'an.
h. Peningkatan pembinaan dan pemantapan pendidikan menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja.
i. Peningkatan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
j. Mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga pasca PON XVI.
k. Membina dan meningkatkan prestasi atlit secara berkesinambungan.

l. Menjadikan pembangunan olahraga sebagai bagian penting dari upaya pencapaian kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. PROGRAM

a. Program perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.
b. Program peningkatan mutu dan perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan.
c. Program pembinaan, penanggulangan dan peningkatan palayanan terhadap penyandng masalah sosial.
d. Program pemanfaatan sarana dan prasarana pasca PON XVI.
e. Program peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan.
f. Program perluasan, pembinaan prestasi dan pembinaan olahraga.

F. PENGEMBANGAN PEMANFAATAN MIGAS, BATUBARA DAN SUMBERDAYA MINIREAL LAINNYA.

1. SASARAN

Sasaran pengembangan dan pemanfaatan Migas, Batubara dan Sumberdaya Mineral lainya diarahkan kepada pemenuhan ekcukupan energi listrik dan gas serta bahan bakar konsumsi masyarakat dalam upaya percepatan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Pengkajian dan pemanfaatan batubara berkalori rendah serta implementasi briket dan upgraded brow coal (UBC) untuk memenuhi peningkatan energi untuk pembangkit listrik dan rumah tangga.
b. Peningkatan upaya diversifikasi, intensifikasi, dan konversi energi dalam usaha penyediaan energi nasional yang optimal dan berkelanjutan.
c. Pengembangan dan pemanfaatan gas dan batubara untuk pembaangunan pembangkitlistrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

3. PROGRAM

a. Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar.
b. Program peningkatan kerjasama antar daerah, regional dan internasional.

c. Program penerapan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
d. Program peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasanm tambang.

G. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. SASARAN

a. Tegaknya hukum khususnya dalam pemberantasan pencurian dan penyelundupan kayu.
b. Terwujudnya pemeliharaan dan pemantapan kawasan hutan.
c. Berkurangnya pelanggaran dan kerusakan sumberdaya kelautan.
d. Meningkatnya kualitas perairan DAS Musi
e. Menurunnya kasus kerusakan lingkungan pertambangan.
f. Meningkatnya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.
g. Meningkatnya pengelolaan limbah perusahaan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya kelautan, termasuk pengawasan dan penegakan hukum.
b. Pemeliharaan dan pematapan kawasan hutan.
c. Peningaktan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan.
d. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
e. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pertambangan.

3. PROGRAM

a. Program pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hiudp.
c. Program rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya air dan hutan.
d. Program peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pertambangan.

H. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI SUMATERA SELATAN

1. SASARAN

Mensinergikan kawasan industri dan kawasan pelabuhan di Tanjung Api-Api dalam upaya memusatkan aktivitas industri pengolahan produk-produk lokal, khususnya untuk mempercepat pengembangan kawasan pantai Timur Sumatera Selatan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan aksesibilitas dari da menuju kawasan.
b. Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai outlet untuk memperlancar aliran investasi dan produksi.

3. PROGRAM

Upaya pembangunan kawasan industri Sumatera Selatan dijabarkan dalam Program Pembangunan Kawasan Tanjung Api-Api secara terpadu.

I. PERKUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI

1. SASARAN

Diarahkan untuk jumlah dan jenis lembaga pelayanan keuangan/permodalan di perdesaan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif dan permodalan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam (KSP) di perdesaan.
b. Perkembangan skim-skim pembiayaan alternatif (sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung rentang atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pangganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas).
c. Memfasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitas bantuan teknis kepada BPR dan Konsultas Keuangan Mitra bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian.
d. Mengembangkan konsep pengaturan dan pengawasan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

3. PROGRAM

a. Program pengembangan lembaga keuangan prekreditan rakyat.
b. Program peningkatan peran lembaga – lembaga perdagangan.
c. Program peningkatan akses masyarakat ke sumberdaya produktif.

J. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. SASARAN

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
b. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur.
c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan.
d. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan.
e. Meningkatnya pembinaan terhadap unsur-unsur kemasyarakatan, ormas, orsospol dan keagamaan.
f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi pembangunan.

2. ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
b. Peningkatan dan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
d. Pembinaan terhadap unsur-unsur kemasyarakatan, ormas,orsospol dan keagamaan.
e. Mempercepat penerapan e-goverment di setiap instansi pemerintah.
f. Menyusun kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan harapan dan aspirasi masyarakat setempat.
g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

3. PROGRAM

a. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan publik.
b. Program pengembangan teknologi informasi.
c. Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur.

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN/NARASUMBER
LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Amir Massani, SH. M.Si	Kepala Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli Utama
2.	Dyah Anugrah.K, MA	Kabid Statistik Sosial Badan Pusat Statistik	Ahli Utama
3.	Drs. Akhmad Najib, SH. M.Hum	Sekretaris Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli Madya
4.	M. Zain Hasanal, SH	Kabid Pemantauan dan Pemulihan	Ahli Madya
5.	Ir. H. Hadenli Ugihan, M.Si	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Ahli Madya
6.	Hasan Basri Aziz, SE M.Si	Kasubbid Pelayanan kpd Masy. Bappeda Prov. Sumsel	Ahli Madya
7.	Ir. Rukman Dayadi	Kasi Kelembagaan DAS BPDAS Prov. Sumsel	Ahli
8.	Ir. Triana Huswani	Kasubbid Analisa dan Evaluasi Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli
9.	Usman Ilyas, SH	Kasubbid Peran Serta Masyarakat Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli
10.	Ir. Muh.Andhy, M.Si	Kasubbid Pembinaan Perizinan Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli Muda
11.	Idrus Salam, S.Sos	Staf Subbid Analisa & Evaluasi Bapedalda Prov. Sumsel	Ahli Muda

DAFTAR NAMA DAERAH DAN IBUKOTA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	INSTANSI LH
1	2	3	4
1.	Sumatera Selatan	Palembang	Bapedalda
2.	Banyuasin	Pangkalan Balai	Dinas, Pertambangan dan LH
3.	Muara Enim	Muara Enim	Bapedalda
4.	Musi Banyuasin	Sekayu	Bapedalda
5.	Musi Rawas	Lubuk Linggau	Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan
6.	Ogan Ilir	Indralaya	Dinas Pertambangan dan LH
7.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	Kantor Pertambangan dan LH
8.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	Bapedalda
9.	OKU Selatan	Muara Dua	Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan
10.	OKU Timur	Martapura	Bapedalda
11.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	Dinas Pertambangan dan LH
12.	Pagar Alam	Pagar Alam	Bagian Ekonomi, Pertambangan, dan LH
13.	Prabumulih	Prabumulih	Dinas LH dan Pertambangan
14.	Palembang	Palembang	Bapedalda

DAFTAR NAMA KEPALA DAN INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	H. Amir Massani, SH. M.Si	Bapedalda Prov. Sumsel	Jl. Aerobik No.4 Kampus POM IX Palembang Telp. 0711-351028
2.	Ir. Parigan	Dinas Pertambangan dan LH Kab. Banyuasin	Jl. Palembang-Pangkalan Balai Km.43 No.14 Desa Mulia Agung Pangkalan Balai. Telp. 0711-891298
3.	Ir. H. AM. Seregar, MM	Bapedalda Kab. Lahat	Jl. Bhayangkara No.8 Bandar Jaya Lahat Telp. 0731-325510
4.	Ir. Hj. Rusmiani Tje'mat, M.Ed	Bapedalda Kab. Muara Enim	Jl. Cut Nyak Dien No.39 Muara Enim Telp. 0734-421774
5.	H. Faisol Andayasa, M.Si	Bapedalda Kab. Musi Banyuasin	Jl. Kol.Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Sekayu Telp. 0714-321486
6.	Drs. Usman Mustofa, M.Si	Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Setda Kab. MURA	Jl. RayaYos Sudarso No.2 Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. 0733-451008
7.	Herman, SH	Dinas Pertambangan dan LH Kab. OI	Jl. Lintas Timur Km.35 Indralaya Telp. 0711-708219
8.	Ir. Djustaf	Kantor Pertambangan dan LH Kab. OKI	Jl. Letnan Darna Jambi No.128 Kayu Agung Telp. 0712-323174
9.	Marwan Moorhs, SH	Bapedalda Kab. OKU	Jl. Lintas Sumatera Desa Kemelak Baturaja Telp.
10.	Drs. Zamzami Hay, M.Si	Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Setda OKU Selatan	Jl. Wedana Pangkoe No.18 Muara Dua Telp. 0735-590770
11.		Bapedalda Kab. OKU Timur	Martapura

12.	Ir. Sulaiman effendi	Dinas Pertambangan dan LH Kota Lubuk Linggau	Jl. Depati Said No.48 Lubuk Linggau Barat Telp. 0735-320633
13.	Hamim Minim, BA	Bagian Ekonomi, Pertambangan dan LH Kota Pagar Alam	Jl. Ais Nasution No.1 Pagar Alam Telp. 0730-622100
14.	Ir. Abu Bakar	Bapedalda Kota Palembang	Jl.Unjuk Jaya Palembang Telp.
15.	Ir. Djunaidi	Dinas LH dan Pertambangan Kota Prabumulih	Jl. Sudirman Prabumulih Telp.

DAFTAR PUSTAKA

- **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**, Panduan Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2005, Jakarta.

- **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**, Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2004, Jakarta.

- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelalolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.

- **Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005, Palembang.

- **Pusat Penelitian Management Air dan Lahan Universitas Sriwijaya**, Pola Daerah Aliran Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001, Palembang.

- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat Penelitian Management Air dan Lahan Universitas Sriwijaya Tahun 2003** tentang Laporan Akhir Pengkajian Komponen Beogeo Fisik dan Soseksbud Sub DAS Musi Tahun 2003, Palembang.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008, Palembang.

- **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2004, Palembang.

- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, Rencana Strategis Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2005, Palembang.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, Program Pembangunan Tahun 2006, Palembang.

- **Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan**, Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2004, Palembang.

- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Riau**, Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Riau Tahun 2004, Pekan Baru.

- **Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan**, Info Cuaca dan Api Sumatera Selatan Edisi Januari 2006, Palembang.